



RENCANA KONTIJENSI BENCANA KEBAKARAN HUTAN, DAN LAHAN KABUPATEN PULANG PISAU 2021

Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau
Provinsi Kalimantan Tengah

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	3
C. Dasar	3
D. Ruang Lingkup	4
E. Aktivasi Rencana Kontinjensi	5
F. Proses Penyusunan	5
BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH	6
A. Wilayah Administrasi.....	6
B. Topografi	9
C. Geologi dan Tanah	9
D. Hidrologi	10
E. Iklim	10
F. Sosial.....	12
G. Prasarana Wilayah.....	18
H. Pemerintahan.....	21
I. Peruntukan Lahan	21
J. Penutupan/Penggunaan Lahan.....	22
K. Infrastruktur Pembasahan Gambut	25
L. Rumah Singgah.....	26
BAB III PENILAIAN RISIKO DAN PENENTUAN KEJADIAN	28
A. Penilaian Risiko.....	28
B. Potensi Bencana	33
C. Penentuan Kejadian	43
BAB IV PENGEMBANGAN SKENARIO	45
A. Skenario Ancaman.....	45

B. Asumsi Dampak.....	46
C. Fasilitas dan Aset.....	47
D. Ekonomi.....	48
E. Pemerintahan.....	48
F. Lingkungan	49
G. Kesehatan.....	50
BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	51
A. Kebijakan	51
B. Strategi	52
C. Struktur Organisasi.....	53
BAB VI PERENCANAAN SEKTORAL	60
A. Koordinasi dan Peran Sektor	60
B. Bidang –Bidang dalam Pos Komando.....	62
C. Peta Rencana Operasi.	76
BAB VII PEMANTAUAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT	77
BAB VIII PENUTUP	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Wilayah Kabupaten Pulang Pisau menurut Kecamatan.....	7
Tabel 2. Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau	8
Tabel 3. Curah Hujan dalam milimeter Tahun 2016-2020.....	11
Tabel 4. Jumlah Penduduk Kabupaten Pulang Pisau	13
Tabel 5. Jumlah Penduduk Kab. Pulang Pisau Berdasarkan Lapangan Usaha	14
Tabel 6. Data Luas Lahan Pertanian 2020.....	15
Tabel 7. Jumlah Prasarana Kesehatan di Kabupaten Pulang Pisau.....	15
Tabel 8. Jumlah Prasarana Kesehatan di Kabupaten Pulang Pisau.....	16
Tabel 9. Jumlah Dokter dan Tenaga Medis di Kab. Pulang Pisau per Kecamatan.....	16
Tabel 10. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kabupaten Pulang Pisau	17
Tabel 11. Kelompok Sumberdaya Lainnya	18
Tabel 12. Kondisi dan Kemantapan Jalan Per Januari 2021.....	19
Tabel 13. Penutupan Lahan/Penggunaan Lahan Kabupaten Pulang Pisau	23
Tabel 14. Data ISPA Tahun 2019	28
Tabel 15. Data ISPA Tahun 2020	29
Tabel 16. Data Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2020	29
Tabel 17. Skoring Penilaian Risiko Bencana	30
Tabel 18. Penilaian Ancaman Bahaya	31
Tabel 19. Daerah Tingkat Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Pulang Pisau	34
Tabel 20. Prakiraan musim kemarau 2021 di Kabupaten Pulang Pisau.....	36
Tabel 21. Prakiraan musim hujan 2021/2022 di Kabupaten Pulang Pisau	37
Tabel 22. Penilaian Curah Hujan.....	37
Tabel 23. Tingkat kesulitan pemadaman kebakaran di lapangan dari segi pembagian waktu:.....	44
Tabel 24. Wilayah Terkena Dampak Kebakaran hutan, lahan dan pekarangan.....	46
Tabel 25. Perkiraan Resiko Penduduk Wilayah Terdampak (Jiwa).....	46
Tabel 26. Daftar Fasilitas.....	47
Tabel 27. Aset yang Terancam	47
Tabel 28. Sektor Ekonomi Yang Terganggu	48
Tabel 29. Daftar Sektor Pemerintahan Yang Terancam	49
Tabel 30. Daftar Lingkungan Fisik Yang Terancam	49
Tabel 31. Jenis Gangguan Kesehatan.....	50

Tabel 32. Jadwal dan Pembagian Kegiatan Bidang Perencanaan	63
Tabel 33. Proyeksi Kebutuhan Bidang Perencanaan	64
Tabel 34. Tabel Jadwal Kegiatan Bidang Logistik dan Sarpras	66
Tabel 35. Proyeksi Kebutuhan Bidang Logistik dan Sarpras	67
Tabel 36. Proyeksi Kebutuhan Bidang Operasi	69
Tabel 37. Skenario Kegiatan.....	70
Tabel 38. Pelaksanaan Skenario	71
Tabel 39. Kegiatan Bidang Admin dan Keuangan	73
Tabel 40. Proyeksi Kebutuhan Bidang Admin dan Keuangan	74
Tabel 41. Proyeksi Kebutuhan Bidang Penegakan Hukum	75
Tabel 42. Jadwal Koordinasi Berkala.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Penyusunan Rencana Kontinjensi	5
Gambar 2. Peta Wilayah Admistratif Kabupaten Pulang Pisau	8
Gambar 3. Grafik Curah Hujan Wilayah Kab. Pulang Pisau Tahun 2016 - 2020	11
Gambar 4. Peruntukan Lahan Wilayah Kabupaten Pulang Pisau	22
Gambar 5. Peta Administrasi Kabupaten Pulang Pisau (RTRWK 2019)	23
Gambar 6. Peta Sebaran Infrastruktur Pembahasan Gambut.....	26
Gambar 7. Matriks Tingkat Bahaya	32
Gambar 8. Peta Tingkat Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan	34
Gambar 9. Matriks Tingkat Hospot per Kecamatan tahun 2016 - 2020.....	35
Gambar 10. Matriks Tingkat Hospot Bulanan tahun 2016 - 2020.....	35
Gambar 11. Peta Prakiraan Awal Musim Kemarau 2021 di Kabupaten Pulang Pisau	38
Gambar 12. Peta Prakiraan Sifat Hujan Musim Kemarau 2021	39
Gambar 13. Peta Prakiraan Sifat Hujan Musim Kemarau 2021	40
Gambar 14. Peta Perbandingan Awal Musim Kemarau 2021	41
Gambar 15. Peta Prakiraan Akhir Musim Kemarau / Awal Musim Hujan 2021 di Kabupaten Pulang Pisau	42
Gambar 16. Grafik Penentuan Kejadian Berdasarkan Tingkat Ancaman	43
Gambar 17. Struktur POSKO KARHUTLA	53
Gambar 18. Peta Rencana Operasi.....	76

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum sub urusan wajib pemerintah Daerah dalam penanganan Bencana, BPBD Pulang Pisau telah menyusun dan mereview disetiap Minimal 2 (dua) Tahun. Dokumen Rencana Kontijensi antisipasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Dokumen ini juga menyesuaikan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Dokumen Rencana Kontijensi merupakan sebagai bentuk mensinergikan standar Operasional Prosedur di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau guna memastikan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana tersebut. Dimana dokumen ini banyak perubahan konten, data maupun informasi-informasi yang didapat dari para pihak. Seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, kelompok masyarakat dan Civil Society Organization (CSO) yang bekerja bersama di Kabupaten Pulang Pisau. Perubahan maupun penambahan berbagai data, mulai infrastruktur, sarana prasarana pendukung, jumlah personil setiap organisasi/instansi/kelembagaan mampu memberikan muatan dalam penguatan strategi antisipasi dalam kesiapsiagaan bencana Karhutla.

Tentunya dokumen ini menjadi sebuah rencana Operasi pada saat Tanggap Darurat bencana, bila terjadinya bencana Karhutla. Sehingga dokumen yang dihasilkan ini tidak mudah, perlu proses dan waktu agar dapat memberikan muatan yang tetap memenuhi standart dan sesuai kondisi wilayah setempat. Harapan besar dengan hadirnya dokumen Rencana Kontijensi Bencana Karhutla dapat memberikan asumsi yang besar dalam perubahan penanganan bencana yang lebih baik lagi saat ini maupun kedepan di Kabupaten Pulang Pisau.

Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya pada para pihak terlibat dalam proses Review dan kepada Tim yang di koordinasi oleh BPBD, Kodim 1011 KLK, Polres Pulang Pisau, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PMD, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Manggala Agni Daops

Kapuas, KPHP XXXI Kahayan Hilir, KPHP XXVIII Kahayan Tengah, Kelompok MPA Buntoi, MPA/Paralegal Tumbang Nusa dan Dunia Usaha, hingga penyusunan dan review dokumen selesai. Dan ucapan terimakasih atas dukungan dari Lembaga KEMITRAAN/Partnership yang memfasilitasi dalam Uji Coba Dokumen Kontijensi melalui kegiatan , Apel dan Simulasi secara baik dan dokumen Rencana Kontijensi Bencana Karhutla 2021 Kabupaten Pulang Pisau terwujud dan sukses.

Pulang Pisau, 30 September 2021

SEKRETARIS DAERAH,

TONY HARISINTA. SE. M.SI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670930 199703 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini dengan semakin meningkatnya kejadian bencana di Indonesia yang umumnya dan Kabupaten Pulang Pisau secara khususnya, terkait dengan beberapa faktor penyebab, baik aktivitas manusia maupun pengaruh alam antara lain degradasi lingkungan, urbanisasi tidak terkendali/tidak dibatasi, eksploitasi hutan berlebihan dan pembukaan lahan yang mengurangi daya resap air, maka upaya bersifat preventif atau pencegahan harus diutamakan. Usaha preventif tersebut telah diyakini memerlukan dana lebih ringan dibandingkan dengan upaya penanggulangan bencana lainnya.

Pada saat ini berbagai sektor, baik oleh Pemerintah melalui kementerian/lembaga/instansi terkait serta lembaga/organisasi non-pemerintah serta masyarakat telah banyak melakukan upaya penanggulangan bencana, dan telah mengembangkan potensi penanggulangan bencana yang sangat berguna bagian pengambilan keputusan terutama dalamantisipasi kejadian bencana yang setiap saat bisa terjadi.

Namun kejadian bencana tetap menunjukkan peningkatan baik dari segi intensitas maupun dampak kerugiannya, serta sampai saat ini penanggulangan ini belum optimal. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, diantaranya adalah:

- Belum sepenuhnya timbul pemahaman dan kesadaran masyarakat yang berada di daerah rawan bencana itu sendiri;
- Belum semua wilayah yang rawan bencana mempunyai sumberdaya dan infrastruktur penanggulangan bencana dengan baik;
- Belum terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik masalah penanggulangan bencana;
- Belum adanya peta kapasitas pengurangan risiko bencana yang terintegrasi dengan baik;
- Belum semua daerah memiliki rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana;

Salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47) adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien. Untuk pelaksanaannya sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dinyatakan bahwa, penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana yaitu meliputi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan, dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bencana yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh pada tahapan pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

Peningkatan ketahanan masyarakat dan wilayah terhadap risiko kebencanaan, diantaranya: membangun budaya kesadaran dan kesiapsiagaan menghadapi bencana, melakukan upaya preventif bencana dengan mempertimbangkan karakteristik kebencanaan secara lebih luas, tidak hanya bencana alam konvensional, namun juga bencana non-alam (man-made disaster) dan bencana kegagalan teknologi, dan membangun ketahanan dan peningkatan kapasitas terhadap ancaman bencana, kemandirian dalam penanganan bencana serta pembangunan infrastruktur yang tangguh. Bencana kebakaran hutan dan lahan merupakan permasalahan serius yang harus dihadapi Kabupaten Pulang Pisau, hampir setiap tahun pada musim kemarau. Kebakaran yang terjadi tidak hanya pada lahan kering tetapi juga pada lahan basah (terutama lahan gambut).

Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu Kabupaten yang rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Hampir setiap tahun pada musim kemarau terjadi kebakaran dengan skala yang cukup luas. Luasnya lahan gambut yang terdegradasi di wilayah ini juga menjadi salah satu pemicu kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan sejarah kejadian kebencanaan Kabupaten Pulang Pisau, kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana yang sering terjadi. Kondisi ini menyebabkan perlunya penanganan serius untuk kebakaran hutan dan lahan.

Hasil analisis risiko menunjukkan bahwa Kabupaten Pulang Pisau berada pada risiko tingkat tinggi untuk bencana kebakaran hutan dan lahan dengan total luas wilayah

199.856,45 Ha. Risiko kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pulang Pisau tersebar di seluruh kecamatan dengan luasan yang berbeda. Penarikan kesimpulan kelas risiko tingkat Kabupaten Pulang Pisau didasarkan pada kelas risiko maksimum di tingkat kecamatan, sedangkan kelas risiko kecamatan diperoleh dari kelas maksimum pada analisis tingkat desa.

B. Tujuan

Dokumen rencana kontinjensi ini disusun sebagai pedoman penanganan bencana kebakaran hutan, lahan dan pekarangan pada kondisi tanggap darurat, sehingga penanganan bencana dapat lebih cepat dan efektif, serta sebagai dasar mobilisasi sumber daya dari setiap Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Lembaga terkaitnya serta Dunia Usaha. Strategi penurunan indeks risiko bencana adalah dengan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana di daerah, Peningkatan ketahanan masyarakat dan wilayah terhadap risiko kebencanaan.

C. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pemekaran Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001, Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT 140/6/2007 Tentang Pedoman Penanggulangan Dampak Bencana di Bidang Pertanian;
13. Peraturan Kepala Badan BNPB Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Kepala Badan BNPB Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Wilayah Administrasi Kabupaten Pulang Pisau;
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2017 tanggal 15 Juni 2017, tentang Penyelenggaraan Penangan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
18. Pedoman Penyusunan Rencana Kontijensi Menghadapi Ancaman Bencana Edisi 3 Tahun 2013.

D. Ruang Lingkup

Cakupan potensi ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan dari rencana kontinjensi ini dibatasi oleh batas administrasi wilayah Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau seluas 8.997 km², yang terdiri dari 8 kecamatan, 4 kelurahan, 96 desa definitif. Pada risiko tingkat tinggi untuk bencana kebakaran hutan dan lahan dengan total luas wilayah 199.856,45 Ha. Risiko kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pulang Pisau tersebar di seluruh kecamatan dengan luasan yang berbeda

E. Aktivasi Rencana Kontinjensi

Aktivasi rencana kontinjensi Wilayah Kabupaten Pulang Pisau ini diprediksi selama 2 (dua) bulan, yaitu pada minggu kedua bulan Agustus sampai dengan minggu kedua bulan Oktober, kondisi ini sangat tergantung pada beberapa indikator, seperti:

- Kondisi cuaca berdasarkan pantauan BMKG
- Deteksi dan sebaran hotspots berdasarkan satelite NOAA-18
- Tingkat akumulasi asap berdasarkan ISPU
- Jumlah dan sebaran titik api (kebakaran) di lapangan

Sehingga Bupati Pulang Pisau diharapkan menetapkan status keadaan darurat bencana, kondisi tersebut di atas di anggap sebagai aktivasi rencana kontinjensi.

F. Proses Penyusunan

Proses Pemutahiran Dokumen rencana kontinjensi ini secara umum dapat digambarkan pada bagan berikut:

Gambar 1. Bagan Penyusunan Rencana Kontinjensi



BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH

A. Wilayah Administrasi

Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu dari 8 (delapan) Kabupaten pemekaran di Provinsi Kalimantan Tengah yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002. Sampai dengan tahun 1990-an wilayah ini merupakan wilayah pembantu Bupati Kapuas di Pulang Pisau yang merupakan bagian dari Kabupaten Kapuas. Dengan keluarnya UU Nomor 22 Tahun 1999, status wilayah dan jabatan pembantu Bupati Kapuas dihapuskan sehingga kecamatan-kecamatan yang semula berada dalam wilayah tersebut kembali menginduk langsung dibawah Bupati Kapuas.

Secara geografis Kabupaten Pulang Pisau terletak pada 10^0-0^0 Lintang Selatan Bujur Timur dan 110^0-120^0 Lintang Selatan. Secara administrasi Kabupaten Pulang Pisau berbatasan dengan:

- Sebelah Utara: Kabupaten Gunung Mas
- Sebelah Timur: Kabupaten Kapuas
- Sebelah Selatan: Laut Jawa
- Sebelah Barat: Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya.

Posisi strategis di sebelah selatan yang berhadapan langsung dengan Laut Jawa adalah tumpuan harapan bagi Kabupaten Pulang Pisau untuk memastikan dirinya yang memiliki pelabuhan laut. Muara sungai yang berhadapan langsung dengan Laut Jawa adalah aliran sungai Kahayan yang arah hulunya menuju ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya. Adanya akselerasi pembangunan di bagian utara Provinsi Kalimantan Tengah seperti Kabupaten Murung Raya, Barito Selatan, Barito Utara, dan Barito Timur serta Kabupaten Kapuas menjadikan Kabupaten Pulang Pisau sebagai harapan besar bagi aksesibilitas transportasi dan sarana fisik yang mendukung pembangunan Kalimantan Tengah secara komprehensif.

Berdasarkan Perda Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2019 Kabupaten Pulang Pisau mempunyai luas wilayah 9.692,99 km² atau 969.298,99 Ha seperti tersaji dalam tabel 1.

Tabel 1. Luas Wilayah Kabupaten Pulang Pisau menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	% Terhadap luas Pulang Pisau
1.	Kahayan Kuala	1.308,83	13,50
2.	Sebangau Kuala	4.133,46	42,64
3.	Pandih Batu	452,76	4,67
4.	Maliku	411,59	4,25
5.	Kahayan Hilir	556,41	5,74
6	Jabiren Raya	1.112,19	11,47
7	Kahayan Tengah	1.094,31	11,29
8	Banama Tingang	623,44	6,43
Jumlah		9.692,99	100

Sumber: BPS Kabupaten Pulang Pisau, 2020

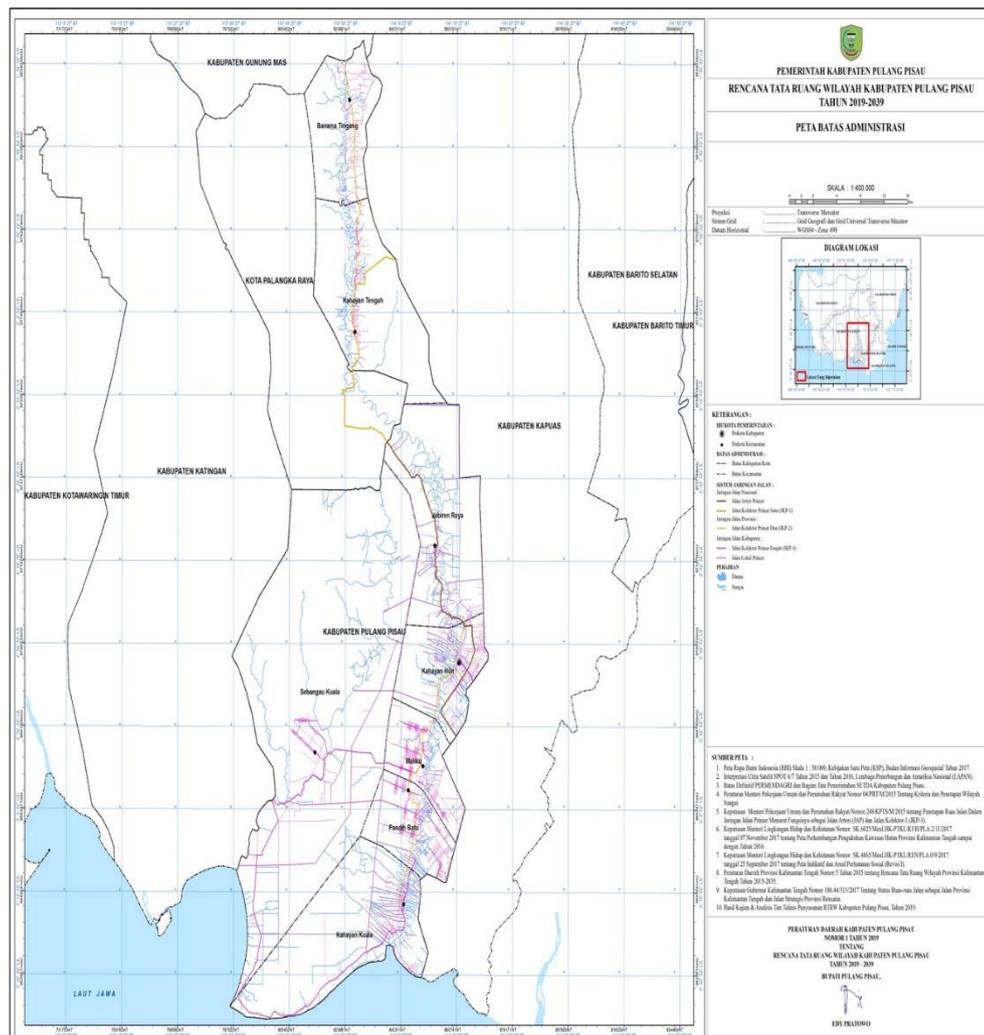
Kabupaten Pulang Pisau terbagi atas 8 (delapan) kecamatan, berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2012, jumlah keseluruhan 95 (sembilan puluh lima) desa dan 4 (empat) kelurahan. Dari jumlah 95 desa tersebut masih berstatus Desa Swadaya. Berdasarkan Indeks Desa Membangun desa di Kabupaten Pulang Pisau berstatus tertinggal 27 desa dan desa maju 68 desa. Tingginya kategori Desa Tertinggal merupakan akibat jauhnya pelayanan publik dan derap pembangunan pada masa sebelum pemekaran.

Tabel 2. Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

Nama Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jumlah		Jumlah RT
		Desa	Kelurahan	
Kahayan Kuala	Bahaur Basantan	12	1	83
Sebangu Kuala	Sebangu Permai	8	-	98
Pandih Batu	Pangkoh Hulu	16	-	217
Maliku	Maliku Baru	15	-	220
Kahayan Hilir	Pulang Pisau	7	3	74
Jabiren Raya	Jabiren	8	-	37
Kahayan Tengah	Bukit Rawi	14	-	44
Banama Tingang	Bawan	15	-	54
Jumlah		95	4	827

Sumber: BPS Kabupaten Pulang Pisau, 2020

Gambar 2. Peta Wilayah Admisnitratif Kabupaten Pulang Pisau



B. Topografi

Keadaan topografi wilayah Kabupaten Pulang Pisau dapat dibagi 2 kawasan yaitu:

1. Bagian Selatan , terdiri atas pantai/pesisir, rawa dengan ketinggian 0 sampai 50 meter dari permukaan laut dengan elevasi 0⁰ sampai 8⁰ serta dipengaruhi oleh pasang surut dan berpotensi mengalami banjir cukup besar pada musim hujan.
2. Bagian Utara, yang merupakan daerah plateum dan perbukitan berpasir dengan ketinggian 50 sampai 100 meter dari permukaan laut dengan elevasi 8⁰ sampai dengan 25⁰ .

Di wilayah ini mengalir dua sungai besar, yaitu sungai Kahayan dan sungai Sebangau, selain itu Kabupaten Pulang Pisau memiliki pantai/pesisir laut sepanjang ± 153,4 km.

C. Geologi dan Tanah

1. Geologi.

Berdasarkan peta Geologi, formasi geologi wilayah Kabupaten Pulang tersusun atas formasi Aluvial (Qa) yang terbentuk sejak zaman Holosen dan formasi batuan Api (Trv), Formasi Aluvium (Qa) merupakan formasi yang tersusun dari bahan-bahan liat kaolinit dan debu bersisipan pasir, gambut, kerakar dan bongkahan lapas, merupakan endapan sungai dan rawa. Sementara formasi Batuan Gunung Api (Trv) merupakan formasi yang tersusun dari batuan breksi gunung api berwarna kelabu kehijauan dengan komponennya terdiri dari andesit, basal dan rijang. Bahan-bahan ini berasosiasi dengan basal yang berwarna coklat kemerahan.

2. Tanah.

Jenis Tanah yang ada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau juga mengikuti pola kondisi topografinya yaitu di bagian Selatan dataran rendah dan rawa-rawa jenis tanah yang dominan adalah tanah gambut dan tanah aluvial, terutama pada bagian selatan dengan kondisi drainase yang kurang bagus. Di bagian utara perbukitan dan pegunungan, jenis tanah yang dominan adalah tanah podsol dan aluvial yaitu pada daerah-daerah pinggir sungai umumnya didominasi oleh tanah aluvial yang berasal dari endapan sungai.

D. Hidrologi

Kabupaten Pulang Pisau memiliki perairan seperti danau, rawa-rawa dan dilintasi oleh jalur sungai. Sungai atau aliran air permukaan yang mengalir di wilayah Kabupaten Pulang Pisau antara lain Sungai Kahayan dengan panjang 626 km dan Sungai Sebangau dengan panjang 180 km. Selain sungai yang disebutkan di atas Kabupaten Pulang Pisau mempunyai 7 (tujuh) anjir/kanal yaitu:

- Anjir Kalampan dengan panjang $\pm 14,5$ km ($\pm 6,5$ km berada di wilayah Pulang Pisau) yang menghubungkan Mandomai dengan Pulang Pisau dan mengarah ke Palangka Raya.
- Anjir Basarang dengan panjang ± 24 km (± 7 km di wilayah Pulang Pisau) yang menghubungkan Kuala Kapuas dengan Pulang Pisau)
- Anjir Terusan Raya dengan panjang ± 18 km, menghubungkan Kuala Kapuas dengan Bahaur melalui Terusan Batu dan yang masuk wilayah ini sekitar 6 km.
- Anjir Terusan Batu dengan panjang ± 6 km.
- Anjir Terusan Nusa dengan panjang ± 24 km.
- Anjir Terusan Sumpur dengan panjang $\pm 0,2$ km.

E. Iklim

Iklim di wilayah Kabupaten Pulang Pisau pada umumnya termasuk daerah beriklim tropis dan lembab, dengan temperatur berkisar antara 21°C s/d 33°C dan temperatur maksimum mencapai 36°C . Sebagai daerah beriklim tropis wilayah Kabupaten Pulang Pisau memiliki intensitas penyinaran matahari cukup tinggi, yaitu rata-rata di atas 50 % dan sumber air yang cukup banyak. Berdasarkan klasifikasi Oldeman (1975) tipe iklim wilayah Kabupaten Pulang Pisau termasuk tipe iklim B1 yaitu dengan bulan basah terjadi antara 7 – 9 bulan (curah hujan > 200 mm/bulan) dan bulan kering (curah hujan < 100 mm/bulan) kurang dari 2 bulan.

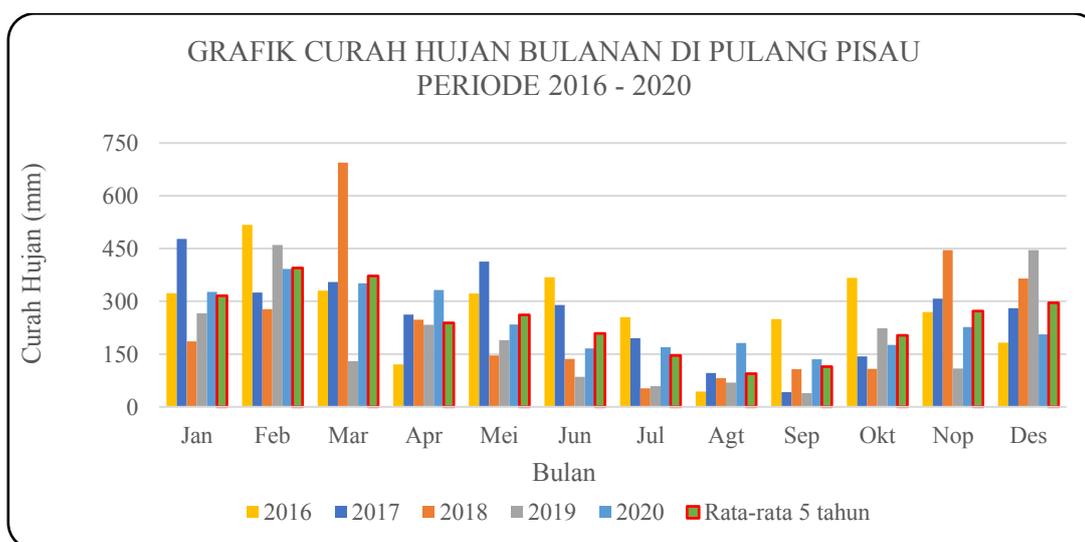
Berdasarkan data curah hujan yang tercatat di stasiun penakar hujan BMKG, curah hujan bulanan dari tahun 2016 s.d tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Curah Hujan dalam milimeter Tahun 2016-2020

BULAN	TAHUN					Rata-rata
	2016	2017	2018	2019	2020	
Jan	323.5	477.5	186	266	327	316
Feb	517.5	325	278	460	392	394.5
Mar	330	355.3	694.5	129.5	351	372.06
Apr	120.5	262	248	233	332	239.1
Mei	322	413	146.5	190	234	261.1
Jun	368.5	290	136	85	166	209.1
Jul	255	195.5	53	59	170	146.5
Agt	43.5	96	82	69	182	94.5
Sep	250	42	107.5	39	135	114.7
Okt	367	143	108	223	176	203.4
Nop	270	308	446	109	227	272
Des	182.5	280.5	365	445.5	206	295.9
Jumlah	3350	3187.8	2850.5	2308	2898	

Sumber: BMKG Tjilik Riwut, 2021

Gambar 3. Grafik Curah Hujan Wilayah Kab. Pulang Pisau Tahun 2016 - 2020



Sumber: BMKG Tjilik Riwut, 2021

F. Sosial

1. Penduduk

Dalam perspektif demografi, penduduk Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan data statistik tahun 2020 sebesar 134.499 jiwa dengan rincian 70.180 laki-laki dan 64.319 perempuan dengan kepadatan penduduk 13,88 orang per km² dengan laju pertumbuhan penduduk 5,81%. Keadaan penduduk ini meskipun pergerakan pertumbuhan hanya mencapai 5,81%, kecenderungan akan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini diasumsikan bahwa adanya percepatan pembangunan baik sarana fisik seperti transportasi jalan, sungai dan kantor pelayanan publik di samping penguatan pemberdayaan masyarakat khususnya di sektor pertanian, perikanan dan perkebunan akan mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk. Pergerakan penduduk ini dibuktikan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Terutama arus kedatangan para pedagang, investor yang menanamkan modal sehingga mendorong orang-orang mengadu nasib di Kabupaten Pulang Pisau termasuk kedatangan para pegawai.

Dari jumlah penduduk tahun 2020 sebesar 134.499 jiwa, terdiri atas 70.180 jiwa laki-laki (52,18%) dan 64.319 jiwa perempuan (47,82%). Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2020 adalah 109.

Tipisnya perbedaan rasio jenis kelamin ini bukan disebabkan oleh tingginya kelahiran laki-laki atau tingginya kematian perempuan, tetapi merupakan penjumlahan total dari seluruh penduduk di kecamatan Kabupaten Pulang Pisau yang memberikan makna bahwa jumlah laki-laki yang meninggalkan daerah asal disebabkan oleh desakan ekonomi untuk mencari kesempatan pekerjaan di daerah lain.

Kondisi ini dari aspek pembangunan khususnya banyaknya perempuan yang terkonsentrasi di pedesaan merupakan tantangan bagi pemerintah untuk meningkatkan produktifitas kerja guna membantu ekonomi rumah tangga penduduk. Penguatan sektor pertanian, perikanan dan perkebunan setidaknya akan mampu

membangun semangat kembali bagi laki-laki di bidang pertanian, perkebunan dan perikanan dan mengurangi mobilitas pekerjaan ke daerah lain.

Ada beberapa kecamatan yang memiliki intensitas mobilitas pekerjaan penduduknya cukup tinggi untuk mencari peluang pekerjaan baik bergerak ke hulu DAS Kahayan maupun ke arah timur dan barat Kabupaten Pulang Pisau, jika dianalisa dari rasio jenis kelamin, dimana penduduk perempuan lebih banyak di dibandingkan dengan jumlah laki-laki sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah Penduduk Kabupaten Pulang Pisau

No	Kecamatan	Populasi		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)	Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan			
1.	Kahayan Kuala	10.386	9.492	19.878	15,19	109
2.	Sebangau Kuala	4.859	3.512	8.371	2,03	138
3.	Pandih Batu	10.704	10.066	20.770	45,87	106
4.	Maliku	13.592	12.468	26.060	63,31	109
5.	Kahayan Hilir	16.080	15.303	31.383	56,40	105
6.	Jabiren Raya	4.763	4.262	9.025	8,11	112
7.	Kahayan Tengah	4.508	4.274	8.782	8,03	105
8.	Banama Tingang	5.288	4.942	10.230	16,41	107
Jumlah		65.324	60.160	134.499	13,88	109

Sumber: BPS Kabupaten Pulang Pisau, 2020

Dari 8 (delapan) kecamatan, konsentrasi penduduk terdapat di Kecamatan Kahayan Hilir. Hal ini dikarenakan Kecamatan Kahayan Hilir merupakan kecamatan yang berada dalam lingkup Kota Kabupaten Pulang Pisau. Sedangkan penduduk dengan relatif sedikit ada di Kecamatan Kahayan Tengah dan Sebangau Kuala. Jumlah penduduk Kecamatan Pandih Batu dan Maliku melebihi penduduk Kecamatan Kahayan Hilir, ini dikarenakan di kedua kecamatan tersebut merupakan konsentrasi penduduk dari Program Eks Transmigrasi. Di kedua Kecamatan inilah merupakan penyuplai hasil-hasil pertanian seperti sayur-mayur yang dijual hingga ke kabupaten tetangga, Kecamatan Kahayan Kuala yang juga dikenal sebagai penyuplai terbesar buah kelapa hingga kecamatan tersebut sering disebut sebagai BUMI BASANTAN. Berdasarkan mata pencaharian, jumlah penduduk di Kabupaten Pulang Pisau yang bekerja sebanyak 68.961 jiwa. Penduduk tersebut bekerja pada berbagai bidang kegiatan, seperti: pertanian, pertambangan dan penggalian, industri, konstruksi, perdagangan, transportasi, konsumsi, keuangan dan jasa, sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 5. Jumlah Penduduk Kab. Pulang Pisau Berdasarkan Lapangan Usaha

No	Lapangan Usaha	Jumlah (Jiwa)	%
1.	Pertanian: Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	32.599	24,24
2.	Industri: Pertambangan dan Penggalian, Industri, Listrik, Gas, dan Air Minum, Konstruksi	13.027	9,68
3.	Jasa: Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi, Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi, Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	23.355	3,13
Jumlah		68.961	51.31

Sumber: BPS Kabupaten Pulang Pisau, 2020

Berdasarkan data tersebut ternyata Kabupaten Pulang Pisau masih mengandalkan kegiatan Pertanian sebagai lapangan usaha. Berikut adalah data luas lahan di Kabupaten Pulang Pisau disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6. Data Luas Lahan Pertanian 2020

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)				Jumlah
		Ladang	Sawah	Tegalan	Lainnya	
1	Kahayan Kuala		8.612	3.506	0	12.118
2	Sebangau Kuala		4.405	25	0	4.430
3	Pandih Batu		14.100	8.865	0	22.965
4	Maliku	98	9.364	7.949	0	17.411
5	Kahayan Hilir		10.525	925	0	11.450
6	Jabiren Raya	210	15.950	12.675	0	28.835
7	Kahayan Tengah	100	15.167	3.245	0	18.512
8	Banama Tingang	10	15.600	2.098	0	17.708
Jumlah		418	93.723	39.288	0	133.429

Sumber: Dinas Pertanian, 2020

2. Kesehatan

Di bidang kesehatan pembangunan prasarana kesehatan untuk masyarakat seperti puskesmas, postu, dan polindes dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seperti puskesmas berjumlah 12 dan puskesmas pembantu berjumlah 72, yang tersebar di kecamatan-kecamatan. Sedangkan Rumah sakit Umum hanya ada 1 unit yang berlokasi di ibukota kabupaten Pulang Pisau. Terdapat juga Rumah Sakit Jiwa yang berlokasi di Desa Bukit Rawi Kecamatan Kahayan Tengah. Berikut sarana dan prasarana kesehatan Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 7. Jumlah Prasarana Kesehatan di Kabupaten Pulang Pisau

No	Kecamatan	Unit Kesehatan				
		RS	Puskesmas	Pustu	Posyandu	Poliklinik
1.	Kahayan Kuala	-	2	8	28	1
2.	Sebangau Kuala	-	1	8	16	-
3.	Pandih Batu	-	1	14	15	1
4.	Maliku	-	2	13	27	-
5.	Kahayan Hilir	1	2	5	35	1

6	Jabiren Raya	-	1	7	12	-
7	Kahayan Tengah	1	1	5	14	-
8	Banama Tingang	-	2	12	17	-
Jumlah		2	12	72	164	3

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau, 2020

Adapun jumlah dokter umum, dokter gigi dan paramedis medis di Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 8. Jumlah Prasarana Kesehatan di Kabupaten Pulang Pisau

No	Kecamatan	Unit Kesehatan			
		RS	Puskesmas	Pustu	Polindes
1.	Kahayan Kuala		2	8	5
2.	Sebangau Kuala	-	1	9	-
3.	Pandih Batu	-	1	13	5
4.	Maliku	-	2	13	9
5.	Kahayan Hilir	1	2	5	7
6.	Jabiren Raya	-	1	6	7
7.	Kahayan Tengah	-	1	4	9
8.	Banama Tingang	-	2	12	5
Jumlah		1	12	70	47

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau, 2021

Adapun jumlah dokter umum, dokter gigi dan paramedis medis di Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana pada tabel 9 berikut.

Tabel 9. Jumlah Dokter dan Tenaga Medis di Kab. Pulang Pisau per Kecamatan

No	Kecamatan	Populasi		
		Dokter	Dokter Gigi	Paramedis Lainnya
1.	Kahayan Kuala	2	-	60
2.	Sebangau Kuala	2	-	37
3.	Pandih Batu	2	-	56
4.	Maliku	4	1	92

5.	Kahayan Hilir	28	3	371
6.	Jabiren Raya	1	-	41
7.	Kahayan Tengah	2	1	59
8.	Banama Tingang	3	-	71
Jumlah		44	5	787

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau, 2021

3. Sumber Daya Manusia

Di Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2020 terdapat 3.216 Pegawai Negeri Sipil. Pada tabel berikut ini adalah komposisi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya.

Tabel 10. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kabupaten Pulang Pisau

Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Fungsional Tertentu	831	1.433	2.264
Fungsional Umum/Staf	317	131	448
Struktural	340	164	504
Eselon V	4	0	4
Eselon IV	213	127	340
Eselon III	95	36	131
Eselon II	28	1	29
Eselon I	0	0	0
Jumlah	1.488	1.728	3.216

Sumber: BPS Pulang Pisau Tahun 2021

Selain jumlah ASN seperti data diatas, terdapat pula sumberdaya yang lain, seperti perusahaan atau pihak swasta yang memiliki Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Brigdalkar) dan Kelompok Masyarakat Peduli Api, Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang semuanya dibentuk di tingkat desa/kelurahan, maupun pembentukan dari instansi/kelembagaan/badan yang lainnya Selengkap dapat dilihat pada tabel 11 dibawah ini:

Tabel 11. Kelompok Sumberdaya Lainnya

No	Kelompok Masyarakat/Perusahaan	Jumlah	Keterangan
1.	Masyarakat Peduli Api	6 Kelompok	Standart Tinggi
2.	Masyarakat Peduli Api	29 Kelompok	Standart Sedang
3.	Masyarakat Peduli Api	51 Kelompok	Standart Rendah
2.	Masyarakat Peduli Tabat	1 Kelompok	Lokasi DPG
3.	KTPA	9 Kelompok	Per kecamatan
4.	Brigdalkar (Swasta-Perusahaan)	9 PBS	Total 32 regu dan 480 Personil
5.	Tagana	48 Kelompok	
6.	Pelopop	6 Kelompok	
7.	TSAK	8 Kelompok	
8.	Pendamping PKH	32 Kelompok	

Sumber: Berbagai sumber dari kelembagaan/OPD/Badan/UPT 2021

Keterangan:

Standart Tinggi :

- 1). Pelatihan, 2). Peralatan Lengkap dan 3). Dukungan Operasional tersedia, 4). Aktif Melaksanakan Patroli.

Standart Sedang:

- 1). Sudah melaksanakan pelatihan, 2). Peralatan standart menengah, 3). Dukungan Operasional belum ada;

Standart Rendah:

- 1). Belum ada pelatihan, 2). Peralatan tersedia namun Minim, 3). Belum ada dukungan operasional

G. Prasarana Wilayah

Prasarana wilayah yang dimiliki oleh Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut:

1. Jalan dan Jembatan

- Jalan Negara sepanjang 119,05 Km yang terdiri dari jalan aspal 119,05 Km.
- Jalan Provinsi sepanjang 167 Km, terdiri dari jalan aspal 142 Km dan jalan kerikil 25 Km.

- Jalan Kabupaten sepanjang 1.170,67 Km terdiri atas jalan aspal, jalan tanah dan jalan batu.
- Jembatan besar sebanyak 8 buah, terdiri jembatan Gohong 900 meter, jembatan Layang Tumbang Nusa 10 Km dan Jembatan Anjir Kalampan 100 meter, jembatan Anjir Kelampan KM.10 panjang 150 meter. Jembatan Sebangau Kuala 200 m dan jembatan Purwodadi 35 m.

Tabel 12. Kondisi dan Kemantapan Jalan Per Januari 2021

NO	KECAMATAN	PANJANG (KM)	Panjang Tiap Jenis Permukaan (Km) Tahun 2020				Panjang Tiap Kondisi Tahun 2020							
			Aspal /Pentrase /Macadam	Perkerasan Rigid /Beton	Telford /Kerikil	Tanah /Belum Tembus	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
							km	%	km	%	km	%	km	%
1	BANAMA TINGANG	118,76	19,45	5,91	61,05	32,34	16,41	13,82	51,31	43,20	18,11	15,25	32,93	27,72
2	KAHAYAN TENGAH	101,37	19,62	5,70	45,06	30,99	17,90	17,66	36,60	36,10	6,90	6,81	39,97	39,43
3	JABIREN RAYA	46,57	1,87	3,88	29,09	11,73	3,82	8,20	28,87	62,00	7,58	16,28	6,29	13,52
4	KAHAYAN HILIR	208,64	65,76	6,77	78,62	57,50	64,55	30,94	68,60	32,88	35,18	16,86	40,31	19,32
5	MALIKU	192,29	40,66	2,51	118,98	30,13	30,11	15,66	104,60	54,40	21,85	11,36	35,86	18,65
6	PANDIH BATU	145,37	29,94	17,98	70,07	27,59	27,93	19,22	75,27	51,78	29,49	20,28	12,88	8,86
7	KAHAYAN KUALA	203,66	24,53	25,04	69,34	84,75	35,00	17,18	90,25	44,31	29,43	14,45	48,99	24,06
8	SEBANGAU KUALA	154,01	3,61	-	125,33	25,07	-	-	127,94	83,07	13,63	8,85	12,44	8,08
TOTAL		1170,67	205,43	67,79	597,54	300,11	195,72	16,72	583,44	49,84	162,17	13,85	229,67	19,62

NO	KECAMATAN	PANJANG (KM)	KEMANTAPAN 2020				SELISIH MANTAP/TIDAK MANTAP	
			MANTAP		TIDAK MANTAP		KM	%
			KM	%	KM	%		
1	BANAMA TINGANG	118,76	67,72	57,02	51,04	42,98	-9,79	-8,24
2	KAHAYAN TENGAH	101,37	54,50	53,76	46,87	46,24	-20,72	-20,44
3	JABIREN RAYA	46,57	32,69	70,20	13,88	29,80	5,88	12,63
4	KAHAYAN HILIR	208,64	133,15	63,82	75,49	36,18	-31,79	-15,24
5	MALIKU	192,29	134,71	70,06	57,70	30,01	78,54	40,84
6	PANDIH BATU	145,37	103,20	70,99	42,37	29,15	-15,07	-10,37
7	KAHAYAN KUALA	203,66	125,24	61,50	78,42	38,51	-14,72	-7,23
8	SEBANGAU KUALA	154,01	127,94	83,07	26,07	16,93	24,80	16,10
TOTAL		1.170,67	779,16	66,56	391,84	33,47	17,13	1,46

KETERANGAN :
BERKURANG (-)
BERTAMBAH (+)

2. Pelabuhan dan Dermaga

Di Kabupaten Pulang Pisau terdapat pelabuhan antar pulau (PT. PELINDO III) yang berada di Ibu Kota Pulang Pisau terletak di Sungai Kahayan, dengan areal pelabuhan seluas 58 Ha dan areal tambat kapal sepanjang 90 M lebar 10 M. Disamping itu terdapat juga dermaga sungai sebanyak 18 buah yang berada di semua Ibu Kota Kecamatan. Serta ada pelabuhan Laut Bahaur yang terhubung dengan Kabupaten Lamongan di Jawa Timur dan Pelabuhan Pelindo III yang berfungsi untuk bongkar muat barang seperti kontainer dan lainnya.

3. Telekomunikasi.

Fasilitas Jaringan Telekomunikasi 100 tiang di 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau selain PT. TELKOM, juga ada jaringan telepon seluler seperti Indosat, Telkomsel, XL, dan Axis sudah mulai menjangkau beberapa kecamatan.

Diatas merupakan bagian fasilitas pendukung pada sarana telekomunikasi, dimana selanjutnya ada pendukung lainnya, seperti ORARI Lokal di Kabupaten Pulang Pisau dengan jumlah personil, sebanyak 65 anggota yang tersebar di 5 kecamatan, yaitu Kahayan Kuala, Pandih Batu, Maliku, Sebangau Kuala dan Kahayan Hilir dengan frekwensi BANKOM YH70DK dan frekwensi Emergency ORARI 14.9020-15.0020.

4. Perbankan

Di bidang Perbankan baru ada 6 (enam) yang sudah masuk di Kabupaten Pulang Pisau yaitu Bank Pembangunan Kalteng, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Mandiri, Bank Nasional Indonesia (BNI), dan Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera.

5. Kelistrikan

Pelayanan Tenaga Listrik sudah menjangkau semua Ibu Kota dan sebagian besar desa yang berasal dari PT. PLN dengan tenaga PLTD maupun Inter Koneksi PLTU/PLTA Riam Kanan Kalimantan Selatan, ada juga PLTU di Desa Buntoi yang sudah beroperasi, PLTS yang dikelola oleh BUMDes Desa Simpur Kecamatan Jabiren Raya.

6. Pertamina

Di Pulang Pisau tepatnya di Desa Kalawa sudah tersedia Depot Pertamina yang mensuplai Bahan Bakar Minyak (BBM untuk sebagian besar Wilayah Kalimantan Tengah dengan jumlah 4 buah SPBU dan 5 SPBU mini yang ada di wilayah Pulang Pisau

7. Air Bersih

Pelayanan Air Bersih pengolahannya masih dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang ada di Kelurahan Pulang Pisau, dengan Unit IKK yang ada di Desa Mantaren I, Bahaur, Buntoi, dan Bukit Rawi. Selain itu beberapa desa sudah ada 11 desa melakukan pengelolaan air bersih dan disalurkan ke masyarakat.

8. Perhotelan

Hotel/Penginapan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau, yang ada hanya Mees Pemkab, masih belum memadai dan masih bertaraf Hotel Melati, belum memiliki Hotel Berbintang. Pada sebagian besar Kecamatan sudah memiliki penginapan sehingga dapat memudahkan tamu yang akan menginap di Kecamatan.

9. Transportasi

Karena letak Pulang Pisau yang strategis terdapat jalan lintas Kalimantan, praktis banyak dilalui oleh berbagai jenis kendaraan darat. Di Kota Pulang Pisau sudah ada angkutan terminal darat dan dermaga sungai untuk kendaraan speed boat, perahu mesin, dan ferry penyeberangan.

Sedangkan untuk bandara terdekat adalah Bandara Tjilik Riwut di Palangka Raya dengan jarak tempuh 2 (dua) jam dari Pulang Pisau dan bandara Syamsudin Noor di Banjarmasin dari Pulang Pisau dengan jarak tempuh kurang lebih 3 jam menggunakan kendaraan darat.

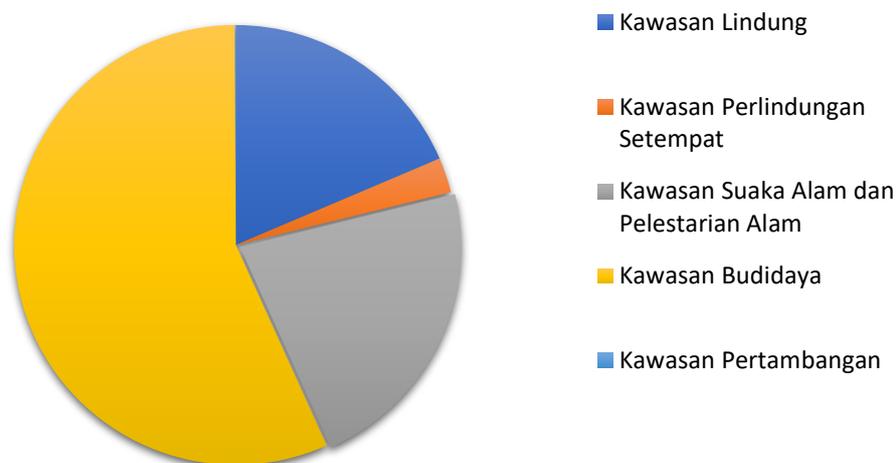
H. Pemerintahan

Instansi pemerintahan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari 15 (lima belas) OPD dan 6 (enam) instansi vertikal serta 1 (satu) OPD tingkat provinsi di kabupaten Pulang Pisau yaitu KPH XXXI dan 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu Balai Taman Nasional Sebangau.

I. Peruntukan Lahan

Berdasarkan RTRW Kabupaten Pulang Pisau tahun 2019, peruntukan lahan yang ada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau terbagi menjadi kawasan hutan Lindung 167.166 Ha (18,58 %), Kawasan Perlindungan Setempat 23,144 Ha (2,572 %), Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam 199.241 Ha (22,145 %), Kawasan Budidaya 510.192 Ha (65,702 %), dan kawasan Pertambangan (563 Ha).

Gambar 4. Peruntukan Lahan Wilayah Kabupaten Pulang Pisau



Berdasarkan Keppmermentan 472 tahun 2018 Kabupaten Pulang Pisau ditetapkan sebagai lokasi pertanian Nasional untuk Tanaman Panganm Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan. Komoditas utama yang dikembangkan adalah Padi, Cabe, Bawang Merah, Karet, dan Sapi Potong. Selain itu komoditas lainnya adalah jagung, kelapa, kelapa sawit, pisang, kopi, jeruk, buah naga, durian, dan lain-lain.

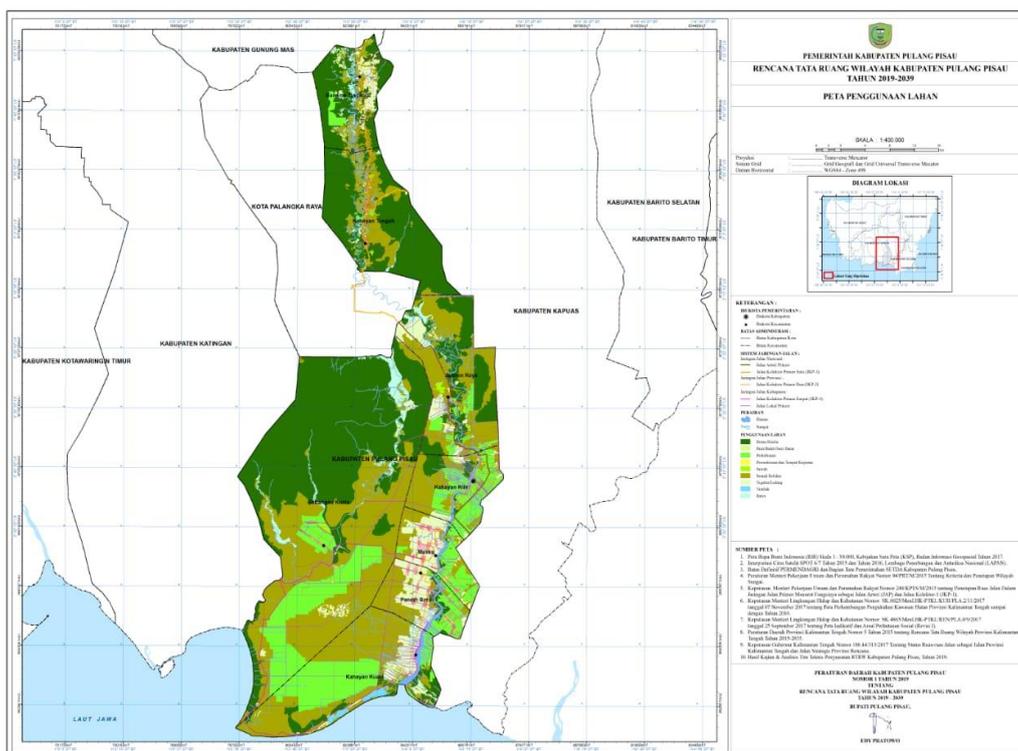
Tanaman perkebunan yang meliputi tanaman kelapa, karet kopi, lada, tebu, jambu mente. Secara umum tanaman perkebunan yang diusahakan adalah tanaman kelapa, kelapa sawit dan karet dengan melihat luas areal perkebunan untuk jenis tanaman ini, selain tanaman kelapa dan karet juga merupakan produk unggulan dan merupakan produk perkebunan favorit. Sedangkan produk hasil hutan ikutan di sangat beragam seperti rotan, lebah madu hutan, gemor dan damar.

J. Penutupan/Penggunaan Lahan

Berdasarkan Peta Penutupan Lahan Kawasan Hutan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pusau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulang Pisau, Penutupan Lahan Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut.

Total		111,219.39
KEC. KAHAYAN HILIR	Hutan Rimba	5,486.99
	Perkebunan/Kebun	24,636.21
	Permukiman dan Tempat Kegiatan	1,095.40
	Rawa	17.66
	Semak Belukar	20,385.96
	Sungai	1,491.74
	Tegalan/Ladang	2,526.95
Total		55,640.91
KEC. KAHAYAN KUALA	Hutan Rimba	11,366.54
	Perkebunan/Kebun	38,361.18
	Permukiman dan Tempat Kegiatan	699.02
	Rawa	20.27
	Sawah	815.24
	Semak Belukar	61,931.88
	Sungai	2,365.72
	Tambak	2,662.37
	Tanah Kosong/Gundul	40.41
	Tegalan/Ladang	12,620.28
Total		130,882.91
KEC. KAHAYAN TENGAH	Danau/Situ	147.90
	Empang	3.98
	Hutan Rimba	78,648.93
	Kolam	0.65
	Pasir/Bukit Pasir Darat	23.62
	Perkebunan/Kebun	1,136.82
	Permukiman dan Tempat Kegiatan	511.95
	Rawa	598.27
	Sawah	157.12
	Semak Belukar	25,495.99
	Sungai	1,533.36
	Tegalan/Ladang	1,171.95
Total		109,430.54
KEC. MALIKU	Empang	2.05
	Hutan Rimba	728.35
	Perkebunan/Kebun	12,561.83
	Permukiman dan Tempat Kegiatan	2,076.72
	Rawa	51.38
	Semak Belukar	9,880.02
	Sungai	1,090.36
	Tegalan/Ladang	14,768.73
Total		41,159.44
KEC. PANDIH BATU	Hutan Rimba	2,635.86
	Perkebunan/Kebun	10,043.04
	Permukiman dan Tempat Kegiatan	1,669.75
	Semak Belukar	14,986.98
	Sungai	1,620.26
	Tegalan/Ladang	14,320.14
Total		45,276.03
KEC. SEBANGAU KUALA	Hutan Rimba	200,779.67

Gambar 5. Peta Administrasi Kabupaten Pulang Pisau (RTRWK 2019)



Tabel 13. Penutupan Lahan/Penggunaan Lahan Kabupaten Pulang Pisau

KECAMATAN	TIPE PENUTUPAN/ PENGGUNAAN LAHAN	Total (Ha)
KEC. BANAMA TINGANG	Danau/Situ	232.69
	Hutan Rimba	34,491.51
	Pasir/Bukit Pasir Darat	503.47
	Perkebunan/Kebun	2,963.51
	Permukiman dan Tempat Kegiatan	402.36
	Rawa	2,097.90
	Semak Belukar	11,247.98
	Sungai	1,459.66
	Tegalan/Ladang	8,945.13
	Total	
KEC. JABIREN RAYA	Empang	20.96
	Hutan Rimba	36,519.73
	Kolam	6.56
	Pasir/Bukit Pasir Darat	2.98
	Perkebunan/Kebun	6,420.68
	Permukiman dan Tempat Kegiatan	401.31
	Rawa	1,858.80
	Sawah	2,194.48
	Semak Belukar	49,698.35
	Sungai	2,793.29
Tanah Kosong/Gundul	2.59	
Tegalan/Ladang	11,299.66	

	Perkebunan/Kebun	52,521.36
	Permukiman dan Tempat Kegiatan	610.93
	Rawa	10,998.53
	Sawah	702.50
	Semak Belukar	141,746.08
	Sungai	1,794.51
	Tegalan/Ladang	4,191.95
Total		413,345.53
Grand Total		969,298.96

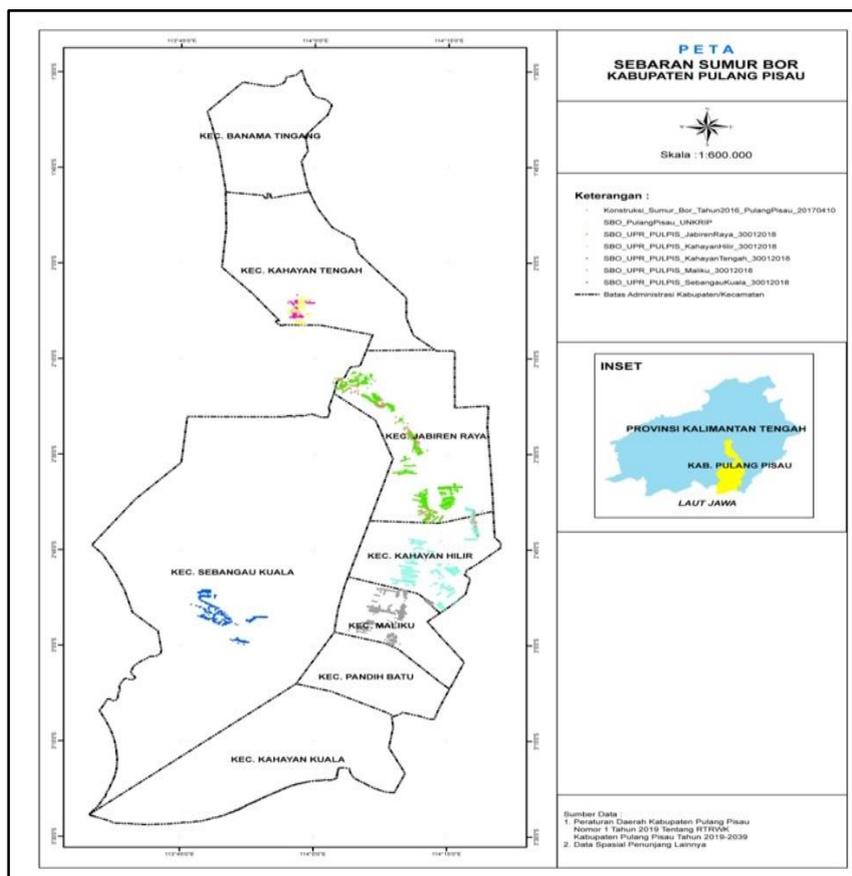
K. Infrastruktur Pembasahan Gambut

Dalam mendukung pengendalian dan penanggulangan bencana, utamanya Kebakaran Hutan dan Lahan, maka berbagai pihak membangun infrastruktur pembasahan gambut. Seperti Badan Restorasi Gambut (BRG)¹ melalui Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Provinsi Kalimantan Tengah, Lembaga Kemitraan dan kelembagaan/instansi pemerintah di Kab. Pulang Pisau. Adapun jumlah masing-masing infrastruktur pembasahan gambut, seperti sumur bor, embung dan sekat kanal, seperti dibawah ini:

1. Sumur Bor yang dibangun tahun 2017 dan 2019, total : **4.119 Unit;**
2. Sekat Kanal dibangun tahun 2017 dan 2019, total : **816 Unit;**
3. Embung 2017 dan 2019 : **11 Unit.**

¹ Sekarang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) sesuai Inpres Nomor 1/2020.

Gambar 6. Peta Sebaran Infrastruktur Pembahasan Gambut



L. Rumah Singgah

Keberadaan rumah singgah sebagai bagian disaat penanggulangan bencana, tentunya sangat diperlukan untuk penanganan pada dampak yang ditimbulkan akibat bencana tersebut. Dibawah ini merupakan daftar rumah singgah yang keberadaannya tersebar di Puskesmas di Kabupaten Pulang Pisau, yakni:

1. Puskesmas Bereng, Jl. Tajahan.Antang RT IV Bereng;
2. Puskemas Tahai, Jl. Poros Aksen Desa Tahai Jaya, Kecamatan Maluku;
3. Puskesmas Pangkoh, Jl Patih Rumbih No. 10 Pangkoh Hulu Kec.Pandih Batu;
4. Puskesmas Bukit.Rawi, Jl. Pelajar Desa Bukit Rawi Kec. Kahayan.Tengah;
5. Puskesmas Maluku, Jl. Tjilik Riwut No. 71 RT 7 Desa Maluku Baru, Kec. Maluku;
6. Puskesmas Sebangau Desa Sebangau Permai, Kec. Sebangau Kuala;
7. Puskesmas Tangkahan, Desa Tangkahan, Kec. Banama Tinggang;

8. Puskesmas Bahaur Hilir, Jl. Hidayatullah No. 140 Kelurahan Bahaur Basantan, Kec. Kahayan Kuala;
9. Puskemas Jabiren Jl. Trans kalimantan km 55 Desa Jabiren, Kec. Jabiren Raya;
10. Puskesmas Bahaur Tengah, Jl. Kalimantan Desa Bahaur Tengah, Kec. Kahayan Kuala;
11. Puskesmas Bawan Jl. Panatau No. 178 RT. 4 Desa Bawan, Kec. Banama Tingang;
12. Puskesmas Pulang Pisau, Jalan Oberlin Metar no.107.

BAB III

PENILAIAN RISIKO DAN PENENTUAN KEJADIAN

A. Penilaian Risiko

Berdasarkan *weather history* untuk Kabupaten Pulang Pisau, dengan luas wilayah mencapai 8.997 km² (899.700 Ha) dengan jumlah penduduk tercatat 134.499 jiwa, memiliki tingkat ancaman bahaya kebakaran hutan dan lahan yang tinggi, terutama pada bulan Agustus – Oktober. Kondisi ini semakin rawan dengan luasnya lahan gambut terdegradasi yang terdapat di wilayah ini.

Dampak bencana terhadap kesehatan masyarakat, diantaranya Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) yang pada tahun sampai 2019 - 2020 terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pulang Pisau, menunjukkan peningkatan yang dapat dilihat di tabel dibawah ini:

Tabel 14. Data ISPA Tahun 2019

KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH Sasaran	TUK ATAU KESUKARAN BERNAPAS					PERKIRAAN PNEUMONIA	REALISASI PENEMUAN PENDERITA PNEUMONIA								BATUK BUKAN PNEUMONIA		
			JUMLAH KUNJUNGAN	DIBENAKAN TATALAKSANA	PERSENTASE YANG	N	PNEUMONIA		PNEUMONIA BERAT		JUMLAH			%	L	P	L+P		
							L		P	L	P	L	P					L+P	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Kahayan Kuala	Bahaur Hilir	989	180	163	90.6	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	92	88	180	
	Bahaur Tengah	649	184	171	92.9	34	0	0	0	0	0	0	0	0.0	85	99	184		
Pandih Batu	Pangkoh	1,319	530	496	93.6	68	1	2	0	0	1	2	3	4.4	263	267	530		
Maliku	Maliku	1,428	649	614	94.6	74	0	0	0	0	0	0	0	0.0	335	314	649		
	Tahai	945	262	235	89.7	49	0	0	0	0	0	0	0	0.0	136	126	262		
Kahayan Hilir	Pulang Pisau	1,538	505	491	97.2	80	5	1	0	0	5	1	6	7.5	235	270	505		
	Bereng	923	471	449	95.3	48	1	0	0	0	1	0	1	2.1	240	231	471		
Jabiren Raya	Jabiren Raya	747	534	506	94.8	39	0	0	0	0	0	0	0	0.0	255	279	534		
Kahayan Tengah	Bukit Rawi	792	414	377	91.1	41	0	0	0	0	0	0	0	0.0	189	224	413		
Banama Tingang	Tangkahen	330	174	152	87.4	17	0	0	0	0	0	0	0	0.0	83	91	174		
	Bawan	550	323	289	89.5	29	0	0	0	0	0	0	0	0.0	161	162	323		
Sebangau Kuala	Sebangau	769	199	181	91.0	40	0	0	0	0	0	0	0	0.0	100	99	199		
Jumlah Kabupaten		10,979	4,425	4,124	93.2	570	7	3	0	0	7	3	10	1.8	2,174	2,250	4,424		
Prevalensi Pneumonia (%)		5.19																	
Jumlah Puskesmas yang melakukan tatalaksana standar minimal 60 %						12													
Persentase Puskesmas yang melakukan tatalaksana standar minimal 60 %						100.0%													
Sumber: Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau																			
Keterangan:																			
* TDDK = tarikan dinding dada ke dalam																			
Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS																			
Persentase perkiraan kasus pneumonia berbeda untuk setiap provinsi, sesuai hasil risikodas																			

65-69	3,576
70-74	2,580
75+	2,420
Jumlah	134,499

Sumber: Dinas Kesehatan, Kab. Pulang Pisau - 2020

Berbagai ancaman lain yang berpotensi bencana juga terdapat di wilayah ini selain kebakaran hutan dan lahan, yaitujanjir rob, angin puting beliung, kebakaran pemukiman, epidemi dan wabah penyakit.

Untuk menentukan tingkat penilaian risiko dan ancaman bencana wilayah Kabupaten Pulang Pisau, maka dilakukan skoring berdasarkan pada dua pendekatan penilaian ancaman, yaitu penilaian probabilitas yang merupakan kemungkinan terjadinya bencana dan penilaian dampak kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan dengan skoring sebagai berikut:

Tabel 17. Skoring Penilaian Risiko Bencana

PROBABILITAS			DAMPAK		
Skor	Asumsi	Rasio (%)	Skor	Asumsi	Rasio (%)
5	Hampir dipastikan	80-90	5	Sangat Parah	80-99
4	Kemungkinan besar	60-80	4	Parah	60-80
3	Kemungkinan terjadi	40-60	3	Sedang	40-60
2	Kemungkinan kecil	20-40	2	Ringan	20-40
1	Kemungkinan sangat kecil	< 20	1	Sangat Ringan	< 20

Berdasarkan tabel 14 dapat dihitung probabilitas dan dampak dengan mengasumsikan bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Pulang Pisau dengan matrik di bawah ini:

Tabel 18. Penilaian Ancaman Bahaya

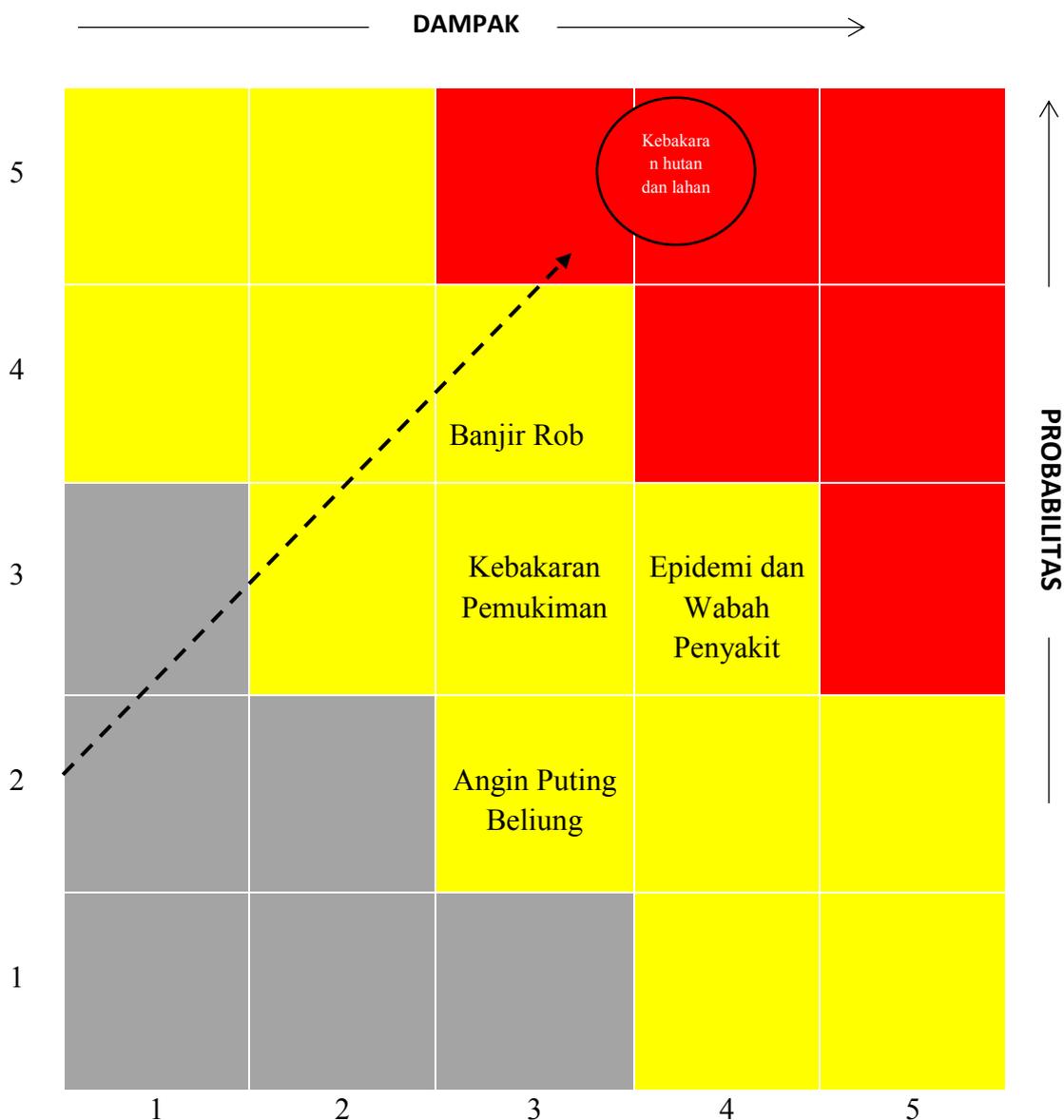
No	Jenis Ancaman	P	D
1.	Kebakaran hutan dan lahan	5	4
2.	Banjir Rob	4	3
3.	Epidemi dan Wabah Penyakit	3	4
4.	Kebakaran Pemukiman	3	3
5.	Angin Puting Beliung	2	3

Keterangan: P= Probabilitas, D=Dampak

Berdasarkan tabel 15 penilaian ancaman bahaya di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau yang memiliki probabilitas dan dampak risiko tinggi terjadinya bencana adalah kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan memiliki probabilitas yang tinggi, karena hampir setiap tahun pada musim kemarau terjadi bencana asap akibat pembakaran yang dilakukan untuk kepentingan pembukaan lahan dan status kepemilikan. Sedangkan dampak yang ditimbulkan akibat bencana asap ini cukup parah, karena selain mengganggu transportasi juga mengancam kesehatan masyarakat serta terganggunya pelayanan publik di berbagai sektor, termasuk menurunnya *biodiversity*.

Selanjutnya untuk melihat skala tingkat bahaya dari masing-masing potensi bencana, maka dapat dilihat pada matriks berikut:

Gambar 7. Matriks Tingkat Bahaya



Berdasarkan matriks tingkat bahaya diatas, dapat disimpulkan bahwa bencana di wilayah Kabupaten Pulang Pisau yang mempunyai probabilitas dan dampak risiko tinggi adalah Kebakaran hutan dan lahan, yang berada pada matriks kolom berwarna merah sehingga harus memiliki rencana kontinjensi sebagai upaya untuk menyusun rencana penanganannya.

B. Potensi Bencana

Berdasarkan peta ketersediaan bahan bakaran dan tingkat kerawanan kebakaran, perkembangan data hotspots serta data progres cuaca maka diketahui potensi bencana kebakaran hutan dan lahan untuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau sebagai berikut:

1. Daerah Rawan Kebakaran

Berdasarkan analisis data spasial menggunakan peta digital dan data pendukung lainnya maka dapat ditentukan daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Proses analisis data spasial dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Peta penutupan lahan diskoring untuk mendapatkan tingkat kerawanan pada masing-masing jenis lahan.
2. Peta gambut diskoring untuk mendapatkan tingkat kesulitan pengendalian berdasarkan kedalaman gambut.
3. Peta aksesibilitas buffering 3 km untuk mendapatkan daya jangkau aktifitas manusia dari jalan dan sungai besar.
4. Peta administrasi buffering 5 km untuk mendapatkan daya jelajah aktifitas manusia dari desa/pemukiman.
5. Peta hotspots dilakukan analisis spasial untuk mendapatkan data kepadatan hotspots.
6. Selanjutnya dari semua peta yang ada dilakukan *overlay* untuk mendapatkan tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan.

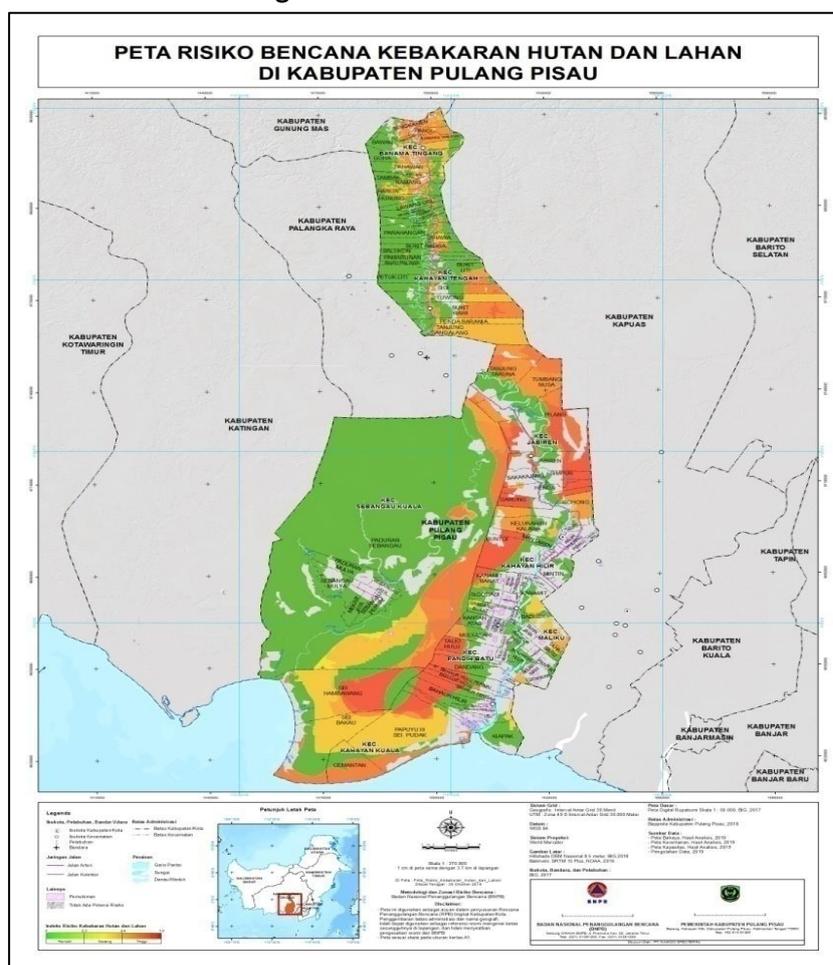
Dari hasil *overlay* tersebut di atas, maka diperoleh daerah-daerah yang perlu diwaspadai karena memiliki tingkat kerawanan yang tinggi dapat terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, sebagai berikut:

Tabel 19. Daerah Tingkat Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Pulang Pisau

No.	Kecamatan	Luas Risiko (ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Banama Tingang	86,75	6.005,01	17.119,65	23.211,41	Tinggi
2	Jabiren Raya	13,12	27,44	61.448,61	61.489,16	Tinggi
3	Kahayan Hilir	27,47	285,59	8.338,39	8.651,45	Tinggi
4	Kahayan Kuala	38,99	11.919,30	40.859,06	52.817,35	Tinggi
5	Kahayan Tengah	222,11	5.521,59	9.260,65	15.004,35	Tinggi
6	Maliku	1,09	4.531,64	1.282,11	5.814,84	Tinggi
7	Pandih Batu	42,55	55,24	8.614,76	8.712,55	Tinggi
8	Sebangau Kuala	144,72	9.533,15	14.477,46	24.155,33	Tinggi
Kabupaten Pulang Pisau		576,81	37.878,95	161.400,69	199.856,45	Tinggi

Sumber: Hasil Kajian Tahun 2019 - BNPB dan BPBD Kab. Pulang Pisau

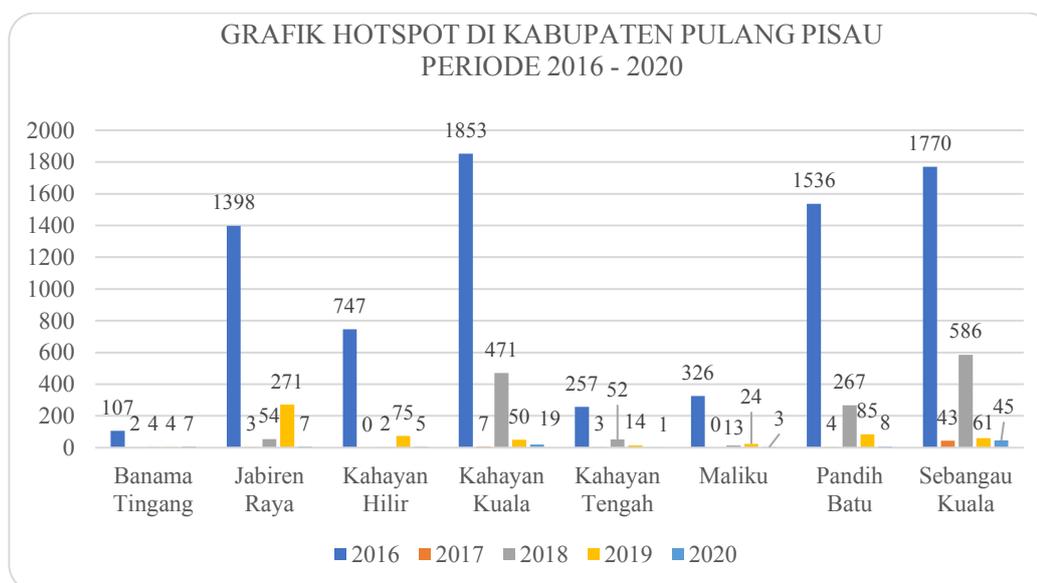
Gambar 8. Peta Tingkat Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan



2. Perkembangan Hotspots

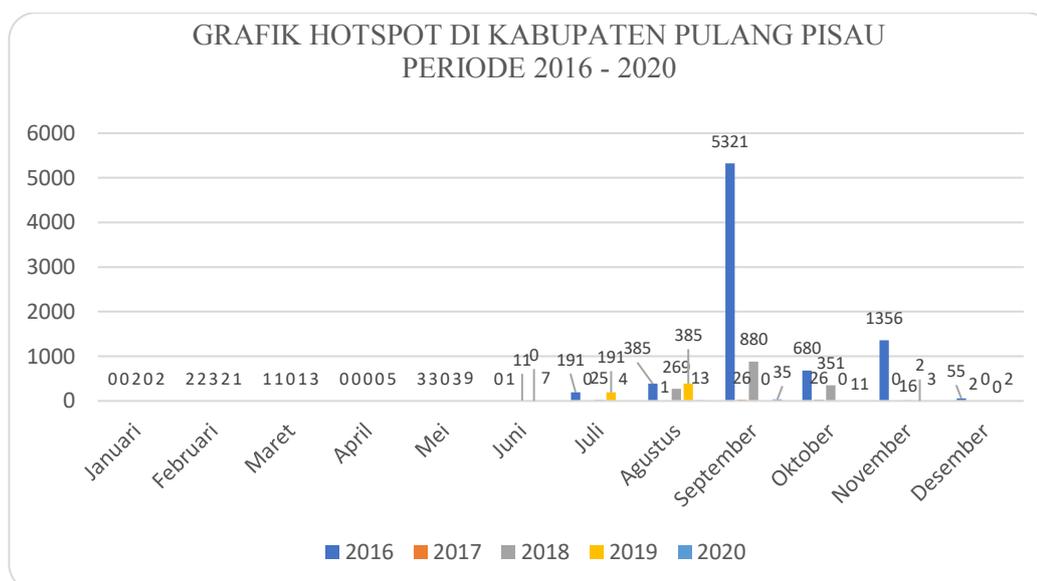
Melalui pendekatan jumlah dan sebaran hotspots yang terdapat di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 s/d 2020 setiap bulannya, maka dapat diketahui potensi terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan.

Gambar 9. Matriks Tingkat Hospot per Kecamatan tahun 2016 - 2020



Sumber: LAPAN

Gambar 10. Matriks Tingkat Hospot Bulanan tahun 2016 - 2020



Sumber: LAPAN

3. Prakiraan Awal Musim Kemarau dan Akhir Musim Kemarau/Awal Musim Hujan 2021

Berdasarkan prakiraan dari BMKG Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2021 diperkirakan bahwa musim kemarau masuk pada bulan Mei dasarian II sampai bulan Juli dasarian III 2021. Musim kemarau tahun 2021 di Pulang Pisau diperkirakan akan berakhir (berarti Awal Musim Hujan) pada bulan September dasarian III sampai bulan Oktober dasarian II 2021.

Tabel 20. Prakiraan musim kemarau 2021 di Kabupaten Pulang Pisau

NO ZOM	Daerah	Awal Musim Hujan antara	Perbandingan terhadap Rata-rata (Dasarian)	Sifat Hujan	Puncak Musim
1	2	3	4*)	5	6
265	Pulang Pisau: kecamatan Sebangau Kuala Bagian Barat	Jul II - Agt I	0	N	Agustus
266	Pulang Pisau: kecamatan Banama Tingang, Jabiren Raya Bagian Barat, Kahayan Hilir Bagian Barat, Kahayan Kuala Bagian Barat, Kahayan Tengah, Maliku Bagian Barat, Pandih Batu Bagian Barat, Sebangau Kuala	Jun II - Jul I	0	N	Agustus
268	Pulang Pisau: kecamatan Jabiren Raya Bagian Timur	Jun I - Jun III	0	N	Agustus
269	Pulang Pisau: kecamatan Jabiren Raya Bagian Selatan, Kahayan Hilir Bagian Timur, Kahayan Kuala Bagian Timur, Maliku Bagian Timur, Pandih Batu Bagian Timur	Mei I - Mei III	+1	AN	Juli

Sumber: Stasiun Meteorologi Tjilik Riwut Palangka Raya, 2021

***) Keterangan:**

- ≤ -3 : Awal Musim Kemarau maju 3 dasarian (10 hari) keatas dari rata-ratanya
- -2 : Awal Musim Kemarau maju 2 dasarian (10 hari) dari rata-ratanya
- -1 : Awal Musim Kemarau maju 1 dasarian (10 hari) dari rata-ratanya
- 0 : Awal Musim Kemarau sama dengan rata-ratanya
- $+1$: Awal Musim Kemarau mundur 1 dasarian (10 hari) dari rata-ratanya
- $+2$: Awal Musim Kemarau mundur 2 dasarian (10 hari) dari rata-ratanya
- $\geq +3$: Awal Musim Kemarau mundur 3 dasarian (10 hari) keatas dari rata-ratanya

Tabel 21. Prakiraan musim hujan 2021/2022 di Kabupaten Pulang Pisau

NO ZOM	Daerah / Kabupaten	Awal Musim Hujan antara	Perbandingan terhadap Rata-rata (Dasarian)	Sifat Hujan	Puncak Musim
265	Pulang Pisau: kecamatan Sebangau Kuala Bagian Barat	Sep II – Okt I	0	N	Desember
266	Pulang Pisau: kecamatan Banama Tingang, Jabiren Raya Bagian Barat, Kahayan Hilir Bagian Barat, Kahayan Kuala Bagian Barat, Kahayan Tengah, Maluku Bagian Barat, Pandih Batu Bagian Barat, Sebangau Kuala	Okt I – Okt III	+1	N	Januari
268	Pulang Pisau: kecamatan Jabiren Raya Bagian Timur	Sep III – Okt II	0	N	Desember
269	Pulang Pisau: kecamatan Jabiren Raya Bagian Selatan, Kahayan Hilir Bagian Timur, Kahayan Kuala Bagian Timur, Maluku Bagian Timur, Pandih Batu Bagian Timur	Sep III – Okt II	-2	N	Januari

Sumber: Stasiun Meteorologi Tjilik Riwut Palangka Raya, 2021

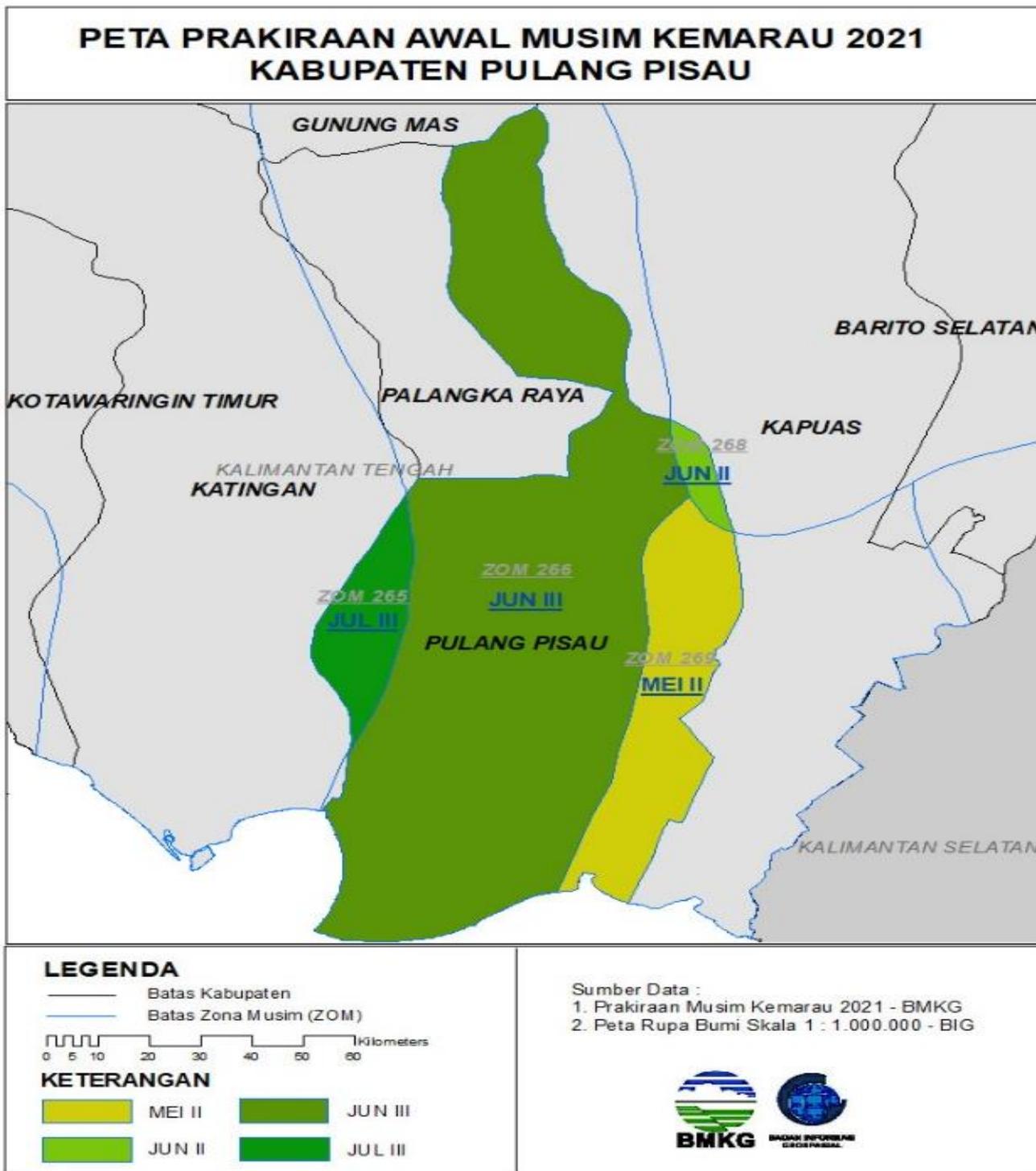
***) Keterangan:**

- ≤ -3 : Awal Musim Hujan maju 3 dasarian (10 hari) keatas dari rata-ratanya
- -2 : Awal Musim Hujan maju 2 dasarian (10 hari) dari rata-ratanya
- -1 : Awal Musim Hujan maju 1 dasarian (10 hari) dari rata-ratanya
- 0 : Awal Musim Hujan sama dengan rata-ratanya
- $+1$: Awal Musim Hujan mundur 1 dasarian (10 hari) dari rata-ratanya
- $+2$: Awal Musim Hujan mundur 2 dasarian (10 hari) dari rata-ratanya
- $\geq +3$: Awal Musim Hujan mundur 3 dasarian (10 hari) keatas dari rata-ratanya

Tabel 22. Penilaian Curah Hujan

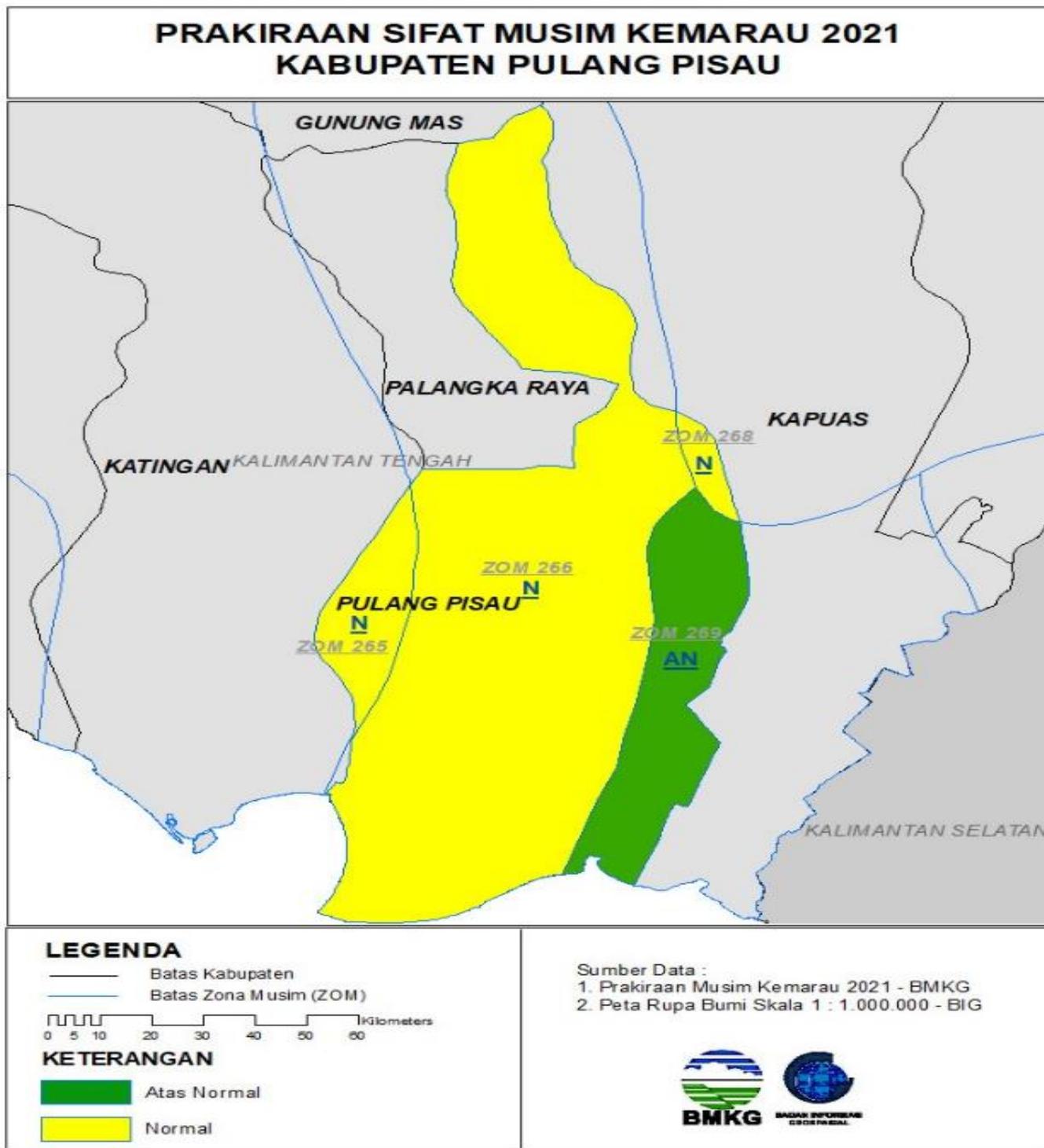
Dasarian	Sifat Hujan
I : tanggal 1 sampai dengan 10	AN : jika nilai curah hujan lebih dari 115% terhadap rata-ratanya.
II : tanggal 11 sampai dengan 20	N : jika nilai curah hujan antara 85%--115% terhadap rata-ratanya.
III : tanggal 21 sampai dengan akhir bulan	BN : jika nilai curah hujan kurang dari 85% terhadap rata-ratanya.

Gambar 11. Peta Prakiraan Awal Musim Kemarau 2021 di Kabupaten Pulang Pisau



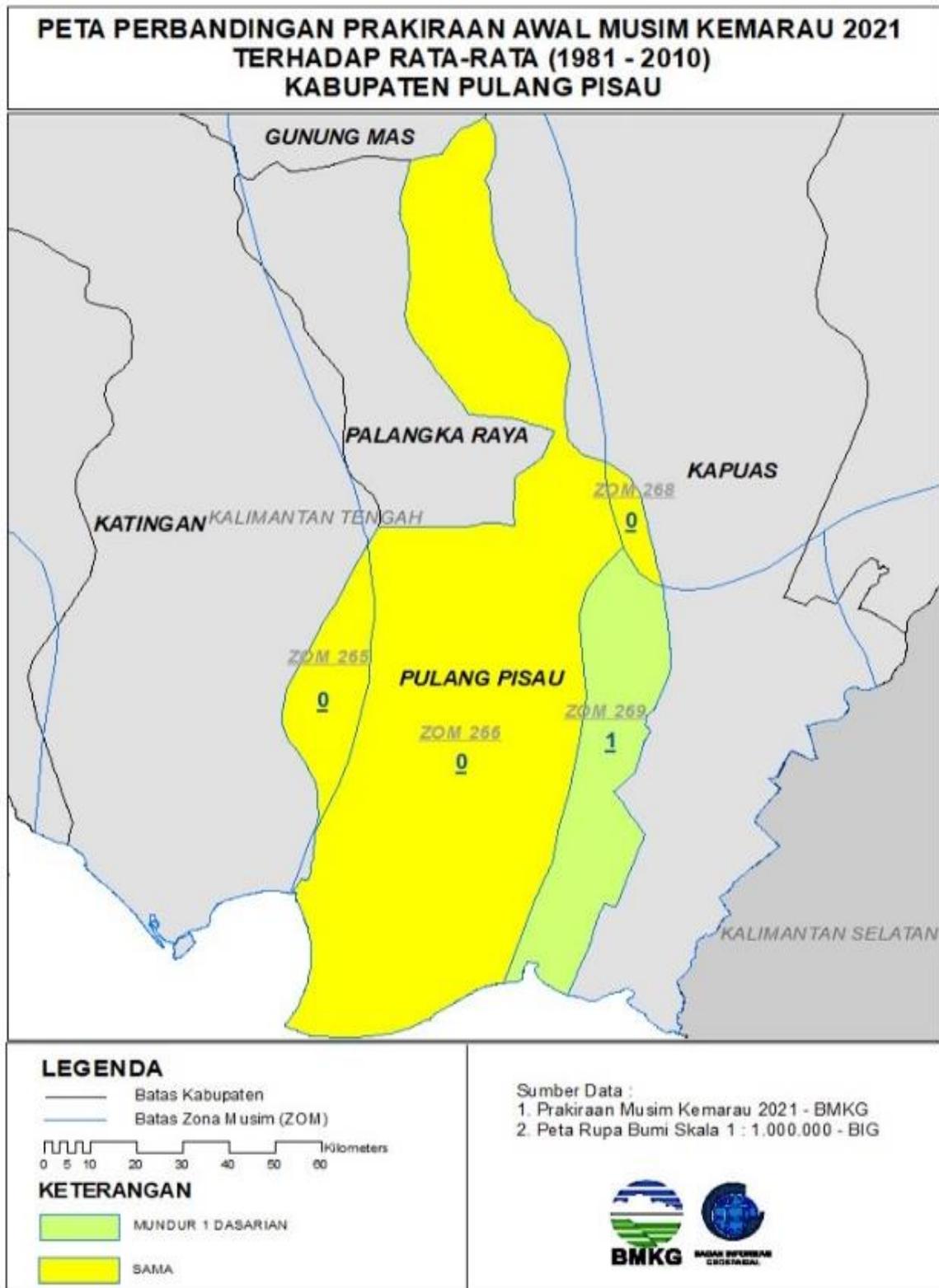
Sumber: Stasiun Meteorologi Tjilik Riwut Palangka Raya, 202

Gambar 12. Peta Prakiraan Sifat Hujan Musim Kemarau 2021



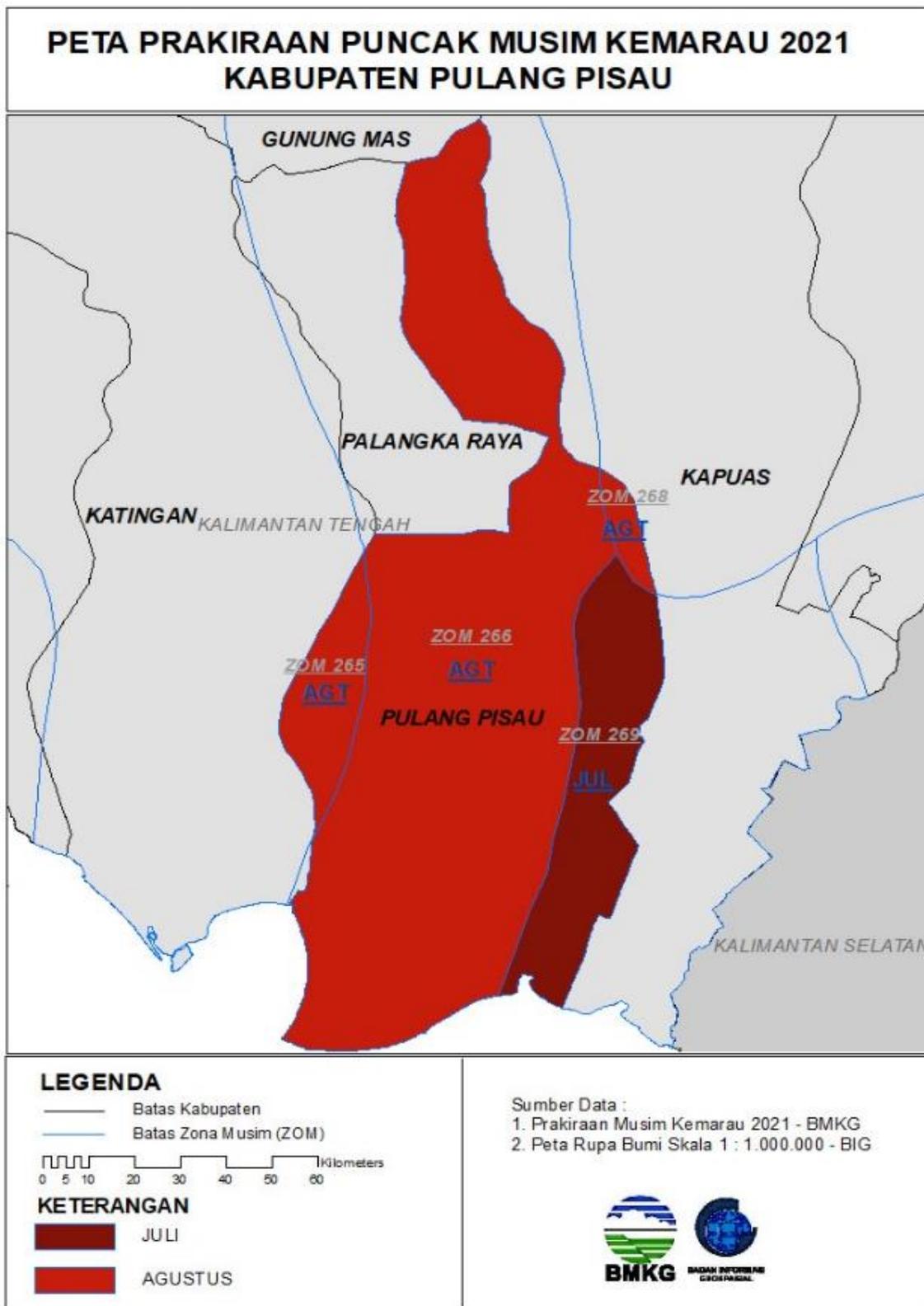
Sumber: Stasiun Meteorologi Tjilik Riwut Palangka Raya, 2021

Gambar 13. Peta Prakiraan Sifat Hujan Musim Kemarau 2021



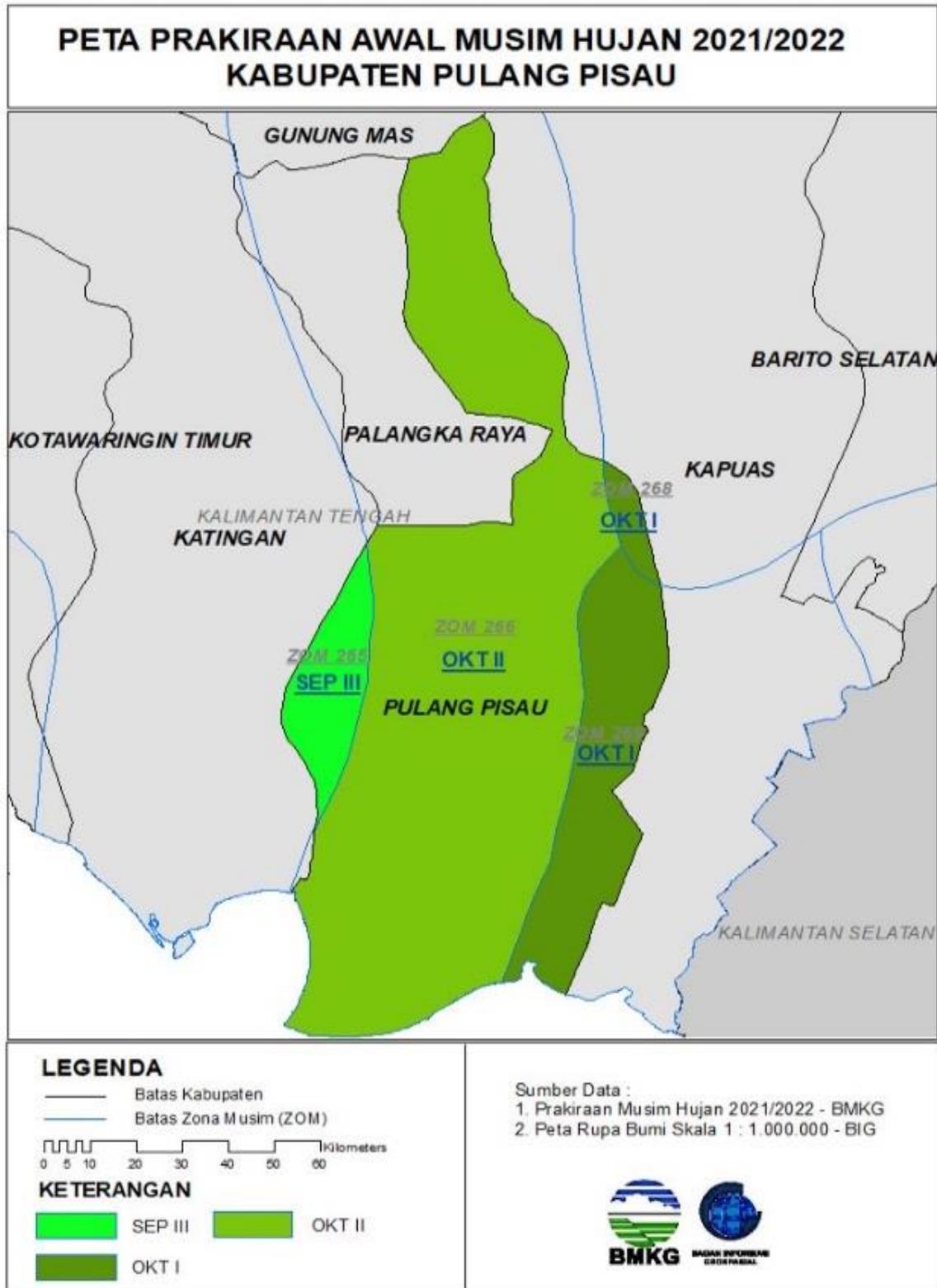
Sumber: Stasiun Meteorologi Tjilik Riwut Palangka Raya, 2021

Gambar 14. Peta Perbandingan Awal Musim Kemarau 2021



Sumber: Stasiun Meteorologi Tjilik Riwut Palangka Raya, 2021

Gambar 15. Peta Prakiraan Akhir Musim Kemarau / Awal Musim Hujan 2021 di Kabupaten Pulang Pisau



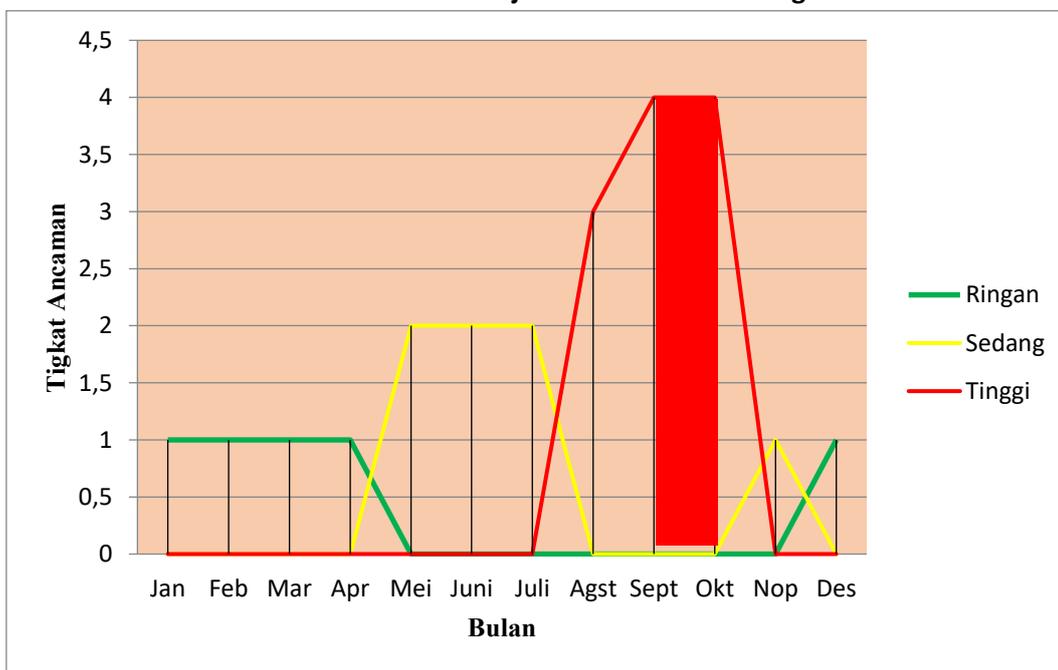
Sumber: Stasiun Meteorologi Tjilik Riwut Palangka Raya, 2021

C. Penentuan Kejadian

Melalui pendekatan siklus iklim, sebaran data hotspot, dan histori kebakaran hutan dan lahan wilayah Kabupaten Pulang Pisau, maka penentuan kejadian kebakaran hutan dan lahan diprediksi selama 3 (tiga) bulan, yaitu pada bulan Agustus – Oktober, dengan puncak bencana asap selama 1 (satu) bulan, yaitu pada minggu kedua bulan September sampai dengan minggu kedua bulan Oktober.

- Dampak kemarau masih dirasakan di Agustus – September, dimana rata-rata kemarau 2 bulan kurang dari 50 mm di bulan Agustus – September, adapun jika terjadi pergeseran akibat adanya penumpukan curah hujan di beberapa titik tertentu.
- Bulan Januari – Februari sempat kering, tetapi kembali di bulan Maret kembali hujan.
- Kerusakan dampak terlambat 1 bulan sehingga sampai bulan Oktober, dalam 3 hari tidak ada hujan perlu ada kewaspadaan terhadap karhutla.

Gambar 16. Grafik Penentuan Kejadian Berdasarkan Tingkat Ancaman



Sedangkan tingkat ancaman kebakaran hutan dan lahan harian terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu ringan, sedang, dan berat. Dengan pola pembagian tingkat ancaman sebagai berikut:

Ringan	
Sedang	
Berat	

Tabel 23. Tingkat kesulitan pemadaman kebakaran di lapangan dari segi pembagian waktu:

Tingkat Kesulitan Pemadaman	Waktu Pemadaman
Sangat Mudah	04.00 – 08.00 WIB
Mudah	08.00 – 10.00 WIB
Sulit	10.00 – 13.00 WIB
Sangat Sulit	13.00 – 04.00 WIB

BAB IV

PENGEMBANGAN SKENARIO

A. Skenario Ancaman

Asumsi yang dibangun untuk skenario ancaman dalam rencana kontinjensi menggunakan pendekatan akumulasi kabut asap secara visual yang disertai dengan peningkatan level Indeks Standart Pencemar Udara (ISPU), serta peningkatan akumulasi pantauan hotspots yang terdeteksi oleh satelite NOAA-18, termasuk informasi prediksi musim kemarau dari BMKG, dimana puncak kemarau panjang terjadi pada bulan September sampai dengan bulan Oktober, dengan dipengaruhi El-Nino dan Dipole Mode. Secara umum skenario ancaman tidak melebihi bencana asap yang terjadi pada tahun 2015, dengan asumsi bahwa pengaruh El-Nino dan Dipole Mode tahun 2014 tidak setinggi tahun 1997.

Lokasi kebakaran hutan dan lahan mencakup 6 (enam) kecamatan yang terjadi secara sporadis, dengan luas kebakaran mencapai 50.000 ha, dengan asumsi skenario sebagai berikut:

1. Kebakaran hutan dan lahan terjadi selama 30 (tiga puluh) hari, yaitu pada minggu kedua bulan Juli sampai dengan minggu kedua bulan Oktober.
2. Puncak akumulasi titik panasterjadi setiap hari pada pukul 13.00 – 16.00 Wib.
3. Arah angin dari Selatan dan Tenggara yang berdampak pada Bandara Tjilik Riwt tidak dapat beroperasi untuk penerbangan komersial (*Visibility*<100 meter).
4. Luasan lahan terbakar selama Juli – Oktober adalah 217.398 ha.
5. Akumulasi hotspots yang terdeteksi sensor MODIS (Satelit Terra & Aqua) selama satu bulan mencapai 5.000 titik. (data tahun 2015 NOAA 1957 titik, MODIS 4305 titik)
6. Kegiatan belajar mengajar dihentikan dan segera diliburkan karena ISPU pada level Indeks 200, sudah melebihi batas normal dan berada pada kategori **TIDAK SEHAT**.
7. Dengan jumlah penduduk terkena dampak 78.827 jiwa, jumlah penduduk terancam serius 39.413 jiwa, jumlah penduduk yang sakit 9.851 jiwa, jumlah penduduk yang luka 25 jiwa.

8. Serta jumlah penduduk yang pindah/mencari kondisi aman/memanfaatkan rumah oksigen 150 jiwa, Jumlah Penduduk yang meninggal dunia 5 orang.

B. Asumsi Dampak

1. Wilayah Terdampak

Akibat Dampak Kebakaran hutan dan lahan diperkirakan akan membawa dampak terhadap 8 kecamatan, 95 desa, 4 kelurahan dan 819 Rukun Tetangga.

Tabel 24. Wilayah Terkena Dampak Kebakaran hutan, lahan dan pekarangan

No.	Nama Kecamatan	Jumlah		Jumlah RT
		Desa	Kelurahan	
1.	Kahayan Kuala	12	1	83
2.	Pandih Batu	16	-	210
3.	Maliku	15	-	209
4.	Jabiren Raya	8	-	36
5.	Kahayan Tengah	14	-	38
6.	Sebangau Kuala	8	-	97
7.	Banama Tingang	15	-	46
8.	Kahayan Hilir	7	3	100

2. Aspek Dampak Kependudukan

Berdasarkan data statistik Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, maka penduduk yang terancam bencana Kebakaran hutan dan lahan meliputi hampir semua wilayah Kabupaten Pulang Pisau, dengan berbagai tingkatan sebagai berikut:

Tabel 25. Perkiraan Resiko Penduduk Wilayah Terdampak (Jiwa)

NO	Kecamatan	Jlh pddk	Perkiraan penambahan pdd pd di siang hari		Jlh total pddk di siang hari		Jiwa terancam		Meninggal		Sakit		Pindah		Pengungsi/Rumah Oksigen	Jumlah yg luka				
			%		%		%		%		%		%			Lk ringan		Lk berat		No perawatan /diam dirumah
			Jmlh	%	Jlh	%	Jmlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%		Jlh	%	Jlh	%	Jlh
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Kahayan Kuala	20.604						9.050		1		2.012		5	5					3.532
2	Sebangau Kuala	8.195						9.032		1		2.008			35					5.518
3	Pandih Batu	20.583						11.639				2.909			5					6.724

4	Maliku	23.872					3.941		1	985		6	30				2.954
5	Kahayan Hilir	27.629					3.751		1	937		24	5				2.812
6	Jabiren Raya	3.906					2.000		1	1.000		15	60				4.500
7	Kahayan Tengah	3.667								412			5				2.532
8	Banama Tingang	4.158								208			5				1.518
	Total	125.484										50	150		134		67

C. Fasilitas dan Aset

Bencana kebakaran hutan dan lahan diprediksi juga akan mengancam berbagai sarana prasarana dan aset yang ada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Berbagai fasilitas dan aset yang diprediksi terkena dampak adalah:

Tabel 26. Daftar Fasilitas

No	Jenis	Terancam	Rusak		
			Ringan	Sedang	Berat
1.	Rumah Penduduk	50 Unit	25	17	8
2.	Fasilitas Umum	60Unit	25	25	10
3.	Fasilitas Sosial				
4.	Prasarana Transportasi Darat	25 Km	5	7	13

Tabel 27. Aset yang Terancam

No.	Jenis	Tingkat Kerusakan Bangunan		Lama Gangguan Fungsi Layanan (Hari)
		Ringan	Berat	
1	Listrik (rincian instalasi PLN)	1		2 Minggu jalur Lintas Trans Kalimantan,
2	Air Baku (rincian instalasi PDAM)			
3	Prasarana transportasi (rincian jalan, jembatan, lapangan terbang, pelabuhan, ...)		4 KM Jalan	1 Bulan Jalan Jembatan Titian Menuju Desa T. Nusa, Tanjung Taruna
4	Komunikasi	2 Buah		Tower G3 dan Telkomsel di Kec Jabiren Raya, 2 Minggu
5	Rumah sakit, ...			
6	Puskesmas, ...			

7	Sekolah	12 Buah		15 Hari sampai 30 Hari,
8	Kantor pemerintahan			
9	Rumah Penduduk	15 Buah		1 s/d 15 Hari
10	Sumur Bor/Embung	10 Buah		Air tidak ada kering
11	Tabat/Sekat Kanal	2 buah		Air kering
TOTAL				

D. Ekonomi

Dari sektor ekonomi dampak dari bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan adalah: Meningkatnya inflasi karena terganggunya suplai barang akibat kendala transportasi, hal ini berpengaruh pada tingginya harga barang di wilayah Pulang Pisau; Berkurangnya penghasilan masyarakat karena keterbatasan ruang gerak akibat pencemaran udara; Terancamnya mata pencaharian sebagian petani, akibat terbakarnya lahan pertanian dan perladangan; Terganggunya proses produksi perkebunan skala besar dan kecil.

Tabel 28. Sektor Ekonomi Yang Terganggu

No	Jenis	Terancam	Keterangan
1.	Komoditas Pertanian	1.500 Ha	Lahan Masyarakat
2.	Produksi Perkebunan	3.500 Ha	Milik Swasta/ Masyarakat

E. Pemerintahan

Dampak kebakaran hutan dan lahan juga akan berpengaruh pada sektor pemerintahan, terutama yang terkait dengan bidang pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 29. Daftar Sektor Pemerintahan Yang Terancam

No	Jenis	Terancam	Kondisi Gangguan		
			Ringan	Sedang	Berat
1.	Pegawai terlambat masuk kerja	50%	20%	15%	15%
2.	Aktifitas Kantor kurang aktif	30 hari	-	10 hari	20 hari
3.	Sekolah diliburkan	70%	-	20%	50%

F. Lingkungan

Lingkungan fisik yang turut terancam akibat kebakaran hutan dan lahan antara lain kawasan hutan, lahan pertanian/perkebunan, keanekaragaman hayati flora dan fauna, termasuk juga ekosistem gambut yang sangat rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan jika sudah mengalami degradasi.

Tabel 30. Daftar Lingkungan Fisik Yang Terancam

No	Jenis	Terancam (%)	Kondisi Gangguan (%) ha		
			Ringan	Sedang	Berat
1.	Hutan Konservasi	10	2	3	5
2.	Hutan Lindung	10	2	2	6
3.	Hutan Produksi	25	5	5	15
4.	Lahan Pertanian	30	5	10	15
5.	Lahan Perkebunan	25	4	6	15
6.	Keanekaragaman Hayati	35	10	10	15
7.	Ekosistem Gambut	35	10	10	15
8.	Hutan Desa	70			13.000
9.	Hutan Kota	50	-	-	5

G. Kesehatan

Akumulasi asap yang timbul akibat kebakaran hutan dan lahan akan mengakibatkan pencemaran udara, sehingga akan berdampak pada kesehatan masyarakat. Asumsi dampak asap terhadap gangguan kesehatan masyarakat adalah:

Tabel 31. Jenis Gangguan Kesehatan

No	Jenis Gangguan Kesehatan	Terancam (%)	Jumlah Terdampak (Jiwa)		
			Ringan	Sedang	Berat
1.	ISPA	60	10	20	30
2.	Asma bronkial	25	5	10	10
3.	Bronkhitis	10	2	3	5
4.	Radang paru-paru	15	5	5	5
5.	Iritasi kulit dan mata	10	1	4	5
6.	Diare				

BAB V

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Kebijakan

Penanggulangan bencana akibat kebakaran hutan, lahan, dan pekarangan di wilayah Kabupaten Pulang Pisau dalam rencana kontinjensi ini mengambil beberapa kebijakan yang merupakan hasil kesepakatan bersama dan sebagai landasan dalam pelaksanaan penanganan bencana. Kebijakan tersebut antara lain:

1. Mengerahkan semua sumberdaya yang ada untuk dapat dipergunakan dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan.
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemadaman yang dilakukan berbagai lembaga, baik pemerintah, swasta dan relawan (Tim Serbu Api), pemadam kebakaran Pemerintah/swasta, termasuk TNI/Polri.
3. Memastikan semua korban (dalam hal ini manusia), dapat segera ditolong, serta membebaskan biaya pengobatan bagi korban yang menderita ISPA, asma bronkial, bronkhitis, radang paru-paru, iritasi kulit dan mata.
4. Menjaga berfungsinya objek vital dan fasilitas pelayanan umum.
5. Apabila intensitas bencana semakin meningkat, maka perlu dilakukan koordinasi dengan pemerintah propinsi, pemerintah pusat dan lembaga-lembaga internasional melalui BNPB serta kementerian terkait.
6. Memantau dan melaporkan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana, baik harta benda maupun jiwa kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
7. Memastikan bantuan yang diperlukan dapat sampai ke daerah yang terkena bencana dengan mengerahkan seluruh armada angkutan.
8. Mengatur bantuan baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku.
9. Mengaktifkan posko bencana untuk memudahkan pengerahan sumberdaya dari dinas/badan/lembaga terkait dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.
10. Mengajukan Dana Belanja Tak Terduga kepada Bupati Pulang Pisau untuk mendukung kegiatan penanggulangan bencana.

11. Mengajukan Dana Siap Pakai dan hujan buatan ke BNPB (melalui BPBD Provinsi dengan rekomendasi Gubernur).

B. Strategi

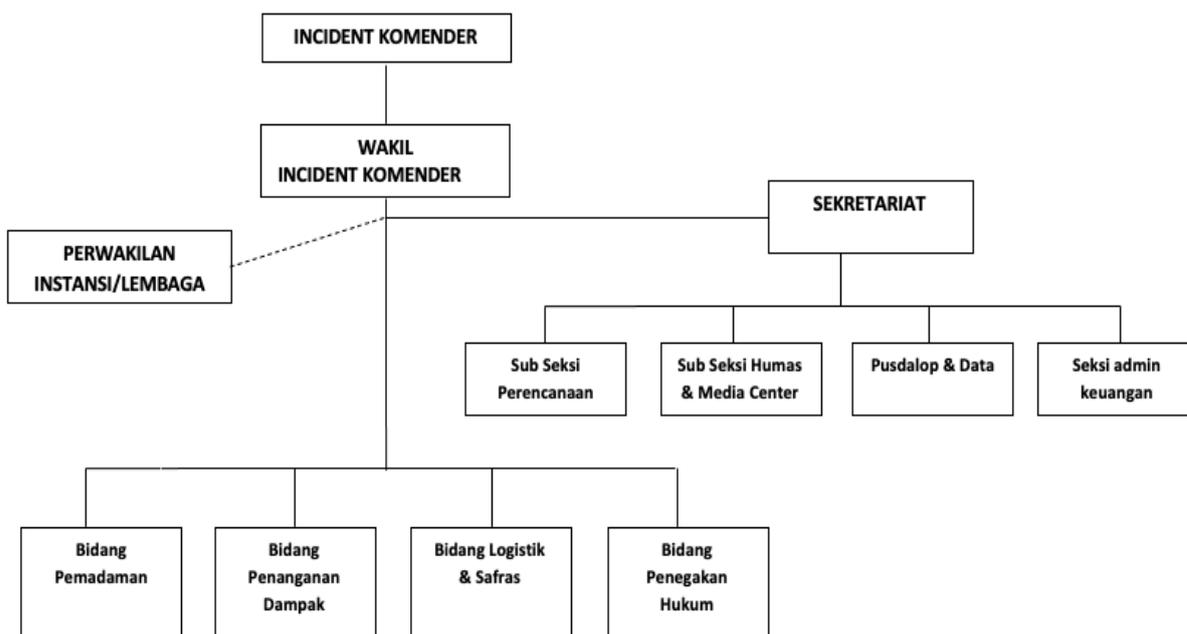
1. Melaksanakan SOP dan mengefektifkan peran posko dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan .
2. Menunjuk Incident Commander penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.
3. Melakukan kaji cepat pada wilayah bencanakebakaran hutan, lahan dan pekarangan untuk mengetahui dampak dan kebutuhan dasar.Mengerahkan semua SDM dan sarpras pemadaman kebakaran hutan dan lahan, guna mengoptimalkan operasi pemadaman termasuk memanfaatkan teknologi tepat guna yang mampu menekan hingga sekecil mungkin potensi kebakaran hutan dan lahan.
4. Mengerahkan semua SDM dan sarpras pemadaman kebakaran hutan dan lahan, guna mengoptimalkan operasi pemadaman termasuk memanfaatkan teknologi tepat guna yang mampu menekan hingga sekecil mungkin potensi kebakaran hutan dan lahan.
5. Menentukan skala prioritas dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, terutama yang menyangkut objek-objek vital dan menjadi indikator tingkat bencana kebakaran hutan dan lahan seperti: Pelabuhan laut Pulau Pisau, jalur transportasi, dan pemukiman.
6. Penyediaan sumber air pada lokasi strategis dan rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
7. Melibatkan semua stakeholders dalam upaya mencegah kemungkinan terjadinya kebakaran susulan, termasuk perangkat adat yang ada di setiap wilayah.
8. Mengoptimalkan peran penegak hukum dalam upaya memberikan efek jera terhadap pelaku pembakaran (illegal).
9. Mengoptimalkan operasional seluruh pusat kesehatan daerah (RSUD, Puskesmas, dan Pos Kesehatan).
10. Memberikan informasi yang jelas kepada pihak yang membutuhkan serta menyebarkanluaskannya melalui media cetak dan elektronik.

11. Mengevaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan serta tindak lanjut yang akan dilakukan.
12. Melibatkan dunia usaha (private sector) dan LSM dalam upaya perlindungan kesehatan bagi korban karhutla.
13. Menggeser waktu proses belajar/ mengajar siswa dan atau meliburkan siswa/pelajar saat ISPU di level sangat tidak sehat (201-300 PM10)

C. Struktur Organisasi

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana, maka untuk menjabarkan kebijakan dan strategi yang sudah disepakati di atas maka diperlukan susunan organisasi untuk dijabarkan dan di Implementasikan di lapangan. Struktur organisasi yang ditetapkan dalam Rencana Kontinjensi Kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana gambar 12 berikut ini:

Gambar 17. Struktur POSKO KARHUTLA



Adapun struktur Posko Karhutla Kabupaten Pulang Pisau di atas mempunyai fungsi sesuai dengan penjelasan sebagai berikut ini:

1. Komandan Status Keadaan Darurat Bencana

Komandan Status Keadaan Darurat Bencana adalah personil dengan pangkat/Jabatan senior peringkat pertama dalam Komandan Tanggap Darurat Bencana sesuai dengan tingkat kewenangannya.

2. Komandan bertugas:

- a. Mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Lapangan (Pusdalap) menjadi Pos Komando Tanggap/Siaga Darurat BPBD Kabupaten Pulang Pisau.
- b. Membentuk Pos Komando Lapangan (Poskolap) di Lokasi bencana di bawah komando Pos Komando Dururat Bencana BPBD KabupatenPulangPisau.
- c. Membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi Status Keadaan Darurat Bencana kebakaran hutan dan lahan.
- d. Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan Status Keadaan Darurat Bencana kebakaran hutan dan lahan.
- e. Komandan status keadaan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

3. Wakil Komandan Status Keadaan Darurat Bencana

Wakil Komandan Status Keadaan Darurat Bencana kebakaran hutan dan lahan adalah personil dengan pangkat/Jabatan senior peringkat kedua dalam Komando Satus Keadaan Darurat Bencana kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan tingkat kewenangannya.

4. Wakil Komandan Status Keadaan Darurat Bencana bertugas:

- a. Membantu Komandan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi Status Keadaan Darurat Bencana.
- b. Mengkoordinasikan tugas-tugas sekretariat, humas, keselamatan dan keamanan serta perwakilan Instansi/lembaga/organisasi.
- c. Mewakili Komandan apabila komandan berhalangan.
- d. Wakil Komandan Status Keadaan Darurat Bencana bertanggung jawab langsung kepada Komandan Status Keadaan Darurat Bencana.

5. Perwakilan Instansi/Lembaga

- a. Perwakilan Instansi/Lembaga bertugas untuk membantu Komandan Status Keadaan Darurat Bencana berkaitan dengan permintaan dan pengerahan sumber daya yang dibutuhkan dari Instansi/Lembaga.
- b. Perwakilan Instansi/Lembaga secara operasional bertanggung jawab langsung kepada Komandan Status Keadaan Darurat Bencana atas pelaksanaan tugasnya dan secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan Instansi/Lembaga terkait.

6. Sekretariat

- a. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris.
- b. Sekretaris bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - i. Menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan
 - ii. Pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil Komandan Status Keadaan Darurat Bencana.
 - iii. Sekretariat bertanggung jawab langsung kepada Komandan Status Keadaan Darurat Bencana.

7. Sub Seksi Perencanaan

- a. Sub Seksi Perencanaan bertugas dan bertanggung jawab atas pengumpulan, evaluasi, analisis data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan Keadaan Darurat Bencana serta menyiapkan dokumen rencana tindakan operasi Keadaan Darurat Bencana.
- b. Kepala Sub Seksi Perencanaan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Status Keadaan Darurat Bencana.

8. Sub Seksi Humas & Media Center

Hubungan Masyarakat dan Media Center bertugas dan bertanggung jawab untuk :

- a. Menghimpun data dan informasi penanganan bencana yang terjadi.
- b. Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media masa dan masyarakat luas.

Kepala Sub Seksi Humas dan Media Center bertanggung jawab langsung kepada Komandan Status Keadaan Darurat Bencana.

9. Sub Seksi Pusdalop & Data

- a. Sub Seksi Pudaop & Data bertugas dan bertanggung jawab:
 - i. Melaksanakan dan pelaporan Kejadian bencana dan Data semua terkait penanganan dan Dampak bencana Karhuta.
 - ii. Menganalisis kebutuhan dalam kaji cepat di lapangan dalam rangka penanganan keadaan Darurat Bencana kebakaran hutan dan lahan.
 - iii. Mendukung pelaporan system Kaji cepat TRC yang dibutuhkan dalam rangka Status Keadaan Darurat Bencana terjadi.
- b. Kepala Sub Seksi Pusdalpo & Data bertanggung jawab langsung kepada Komandan Status Keadaan Darurat Bencana.

10. Sub Seksi Administrasi Keuangan

- a. Bidang Administrasi Keuangan bertugas dan bertanggung jawab:
 - i. Melaksanakan semua administrasi keuangan.
 - ii. Menganalisis kebutuhan dana dalam rangka penanganan Keadaan Darurat Bencana yang terjadi.
 - iii. Mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka operasi Status Keadaan Darurat Bencana.
- b. Kepala Sub Seksi Administrasi Keuangan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Status Keadaan Darurat Bencana.

11. Bidang Pemadaman

Pemadaman bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghentikan kebakaran hutan, lahan dan pekarangan yang terjadi guna mengurangi tingkat kerugian yang ditimbulkan. Dalam pelaksanaannya kegiatan pemadaman dilakukan dengan:

- a. Pemadaman Darat, melalui:
 - i. Pengerahan personil dan peralatan yang ada di semua instansi/lembaga untuk melakukan kegiatan pemadaman.
 - ii. Menentukan skala prioritas lokasi kebakaran, diutamakan pada lokasi-lokasi yang menyangkut objek vital dan lingkungan masyarakat.
 - iii. Pembagian wilayah pemadaman pada masing-masing regu pemadaman untuk efektifitas pemadaman.
 - iv. Menggunakan metode pemadaman manual, semi mekanis, dan mekanis sesuai kondisi dan karakteristik wilayah kebakaran.

- b. Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC)

Melalui kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dilakukan kegiatan TMC yang bertujuan untuk operasi hujan buatan. Kegiatan ini dilakukan dengan metode penaburan garam di atmosfer (awan) guna mempercepat proses pembentukan (*trigger*) dan akumulasi awan *commulus nimbus*, sehingga dapat memicu terjadinya hujan.

12. Bidang Penanganan Dampak

Dalam rangka penanggulangan korban dan meminimalisir kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan, lahan dan pekarangan, maka penanganan dampak harus dilakukan secara sinergis dan terorganisir dengan baik, seperti:

- i. Pengerahan personil dari masing-masing institusi/lembaga dalam rangka memberikan pertolongan pada korban.
- ii. Penanganan korban yang mengalami sakit dan luka.
- iii. Penanganan pengungsian dan pembagian masker

- iv. Menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh personil Komando Status Keadaan Darurat Bencana dalam menjalankan tugas.
- v. Menjaga keamanan penanganan Status Keadaan Darurat Bencana serta mengantisipasi hal-hal di luar dugaan atau suatu keadaan yang berbahaya.
- vi. Pelaksanaan operasi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan Status Keadaan Darurat Bencana
- vii. Kepala Bidang Penangan Dampak bertanggung jawab langsung kepada Komandan Status Keadaan Darurat Bencana.

13. Bidang Logistik Dan Sarfras

Bidang Logistik dan Peralatan bertugas dan bertanggung jawab:

- 1) Menyediakan fasilitas, jasa dan bahan-bahan serta perlengkapan Keadaan Darurat Bencana.
- 2) Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan.
- 3) Melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum.
- 4) Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari Instansi/Lembaga/Organisasi yang terkait.

Kepala Bidang Logistik dan Peralatan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Status Keadaan Darurat Bencana.

14. Penegakan Hukum

Untuk memberikan *shock therapy* bagi pelaku pembakaran yang tidak terkendali dan *illegal*, dilakukan upaya penegakan hukum dengan mengoptimalkan peran Polri dan PPNS. Penindakan hukum dilakukan secara tegas agar tidak lagi terjadi pembakaran hutan dan lahan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam tahapan ini adalah:

- 1) Melakukan pulbaket (pengumpulan bahan keterangan) pada lokasi terjadi kebakaran, untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kebakaran, pelaku pembakaran, luas areal yang terbakar, pemilik lahan (status lahan), dll.
- 2) Setelah diketahui status lahan (identifikasi) maka proses hukum disesuaikan dengan kewenangan penegak hukum, baik Polri maupun PPNS.
- 3) Selanjutnya dilakukan proses hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 4) Kepala Bidang Penegakan Hukum bertanggung jawab langsung kepada Komandan Status Keadaan Darurat Bencana.

BAB VI

PERENCANAAN SEKTORAL

A. Koordinasi dan Peran Sektoral

Dalam rangka mensinergiskan kegiatan masing-masing institusi/lembaga dalam upaya penanganan bencana kebakaran hutan, lahan dan pekarangan, maka dilakukan pembagian peran sesuai dengan tupoksi baik di tingkat pusat, provinsi, maupun daerah. Dengan perpedoman kepada Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;

Tingkat Kabupaten Pulang Pisau

1. Bupati selaku pimpinan daerah tertinggi di wilayah Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau sebagai Komandan Posko penanganan darurat (incident commander) untuk pengendalian operasi di wilayah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Komandan penanganan darurat mempunyai tugas:
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan, lahan dan pekarangan di wilayahnya.
 - b. Menyusun perencanaan dan kesiapsiagaan daerah berdasarkan tingkat kerawanan bencana.
 - c. Menyusun organisasi di lapangan, membuka posko di lapangan dan mengaktifkan crisis center.
 - d. Memberlakukan rencana operasi sebagai perintah operasi tanggap darurat dalam rangka penanggulangan bencana asap jika eskalasi meningkat.
 - e. Membuka Pusdalops, melaporkan tindakan yang telah diambil dan upaya serta tembusannya disampaikan kepada Propinsi serta BNPB melalui melalui crisis center.
3. Unsur teknis dari didukung oleh instansi teknis/dinas/badan Kabupaten Pulang Pisau, antara lain:
 - a. Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau
 - b. Dinas Kominfo
 - c. Dinas Perhubungan
 - d. Dinas Pertanian

- e. Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan
 - f. Dinas Kesehatan
 - g. BPBD dan Pemadam kebakaran Kabupaten Pulang Pisau.
 - h. Badan Kesbang & Politik
 - i. Dinas Ketahanan Pangan
 - j. Dinas Sosial
 - k. Dinas PUPR
 - l. Dinas Satpol PP & Linmas
 - m. Badan PP & KB
 - n. Dinas PMD
 - o. Dinas Pendidikan
 - p. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - q. Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat dan Agraria
4. Instansi teknis yang berada di Kabupaten Pulang Pisau:
Pelaksanaan tugas dibantu oleh unsur teknis dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan juga didukung oleh instansi teknis pusat, antara lain:
- a. BMKG
 - b. TNI (Kodim)
 - c. POLRI (Polres)
 - d. SAR
 - e. BPN
 - f. BPHI-KL (Manggala Agni)
 - g. KPHP 31 Kahayan Hilir dan KPHP 28 Kahayan Tengah
 - h. Dunia Usaha / PT. MKM Grup / Best Agro Internasional
 - g. PDAM
 - h. PLN
5. Unsur Relawan
- Unsur masyarakat yang dapat berperan serta dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan , mulai dari kegiatan pencegahan hingga pemadaman, antara lain:
- a. Masyarakat Peduli Api disetiap Desa/Kel
 - b. Pramuka
 - c. KarangTaruna / Orsos

- d. LSM
- e. ORARI/RAPI
- f. TSA/TSAK/KMPK/RPK/MPA
- g. Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat.

B. Bidang –Bidang dalam Pos Komando

Posisi posko yang berperan sebagai incident commander system (ICS) dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) untuk dapat mengakomodir beberapa kebutuhan dari masing-masing bidanggr, seperti:

1. Bidang Perencanaan
2. Bidang Operasi
3. Bidang Logistik dan Sarfras
4. Bidang Admin/Keuangan
5. Bidang Penegakan Hukum

1. Bidang Perencanaan

a. Situasi

Kebakaran hutan dan lahan yang selalu terjadi pada musim kemarau merupakan bencana yang relatif bisa diprediksi waktu kejadiannya. Namun mengingat luasnya wilayah di Kabupaten Pulang Pisau, maka lokasi kejadian kebakaran yang sporadis mengakibatkan kejadian kebakaran menjadi sulit untuk ditangani, terutama untuk daerah remote dengan akses transportasi yang terbatas. Kondisi ini dalam penanganannya mengharuskan terbangunnya sistem koordinasi dan perencanaan yang terpadu dan terarah dari semua unsur terkait, sehingga peranan posko dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan menjadi strategis dan prioritas.

b. Sasaran

- 1) Terwujudnya koordinasi penanganan bencana asap akibat kebakaran hutan lahan dan pekarangan sehingga dapat bergerak secara sinergis dan terpadu dalam tanggap darurat.
- 2) Terwujudnya pendataan kerugian dan korban yang akuntabel.

- 3) Terwujudnya manajemen penanganan korban dan pengungsi.
- 4) Terwujudnya koordinasi antar koordinator lapangan dari masing-masing sektor dan terwujudnya kebutuhan logistik masing-masing sektor.
- 5) Terwujudnya sistem deteksi dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta terwujudnya sistem informasi dan publikasi yang akuntabel.

c. Kegiatan

Tabel 32. Jadwal dan Pembagian Kegiatan Bidang Perencanaan

No	Kegiatan	Pelaku/Penanggung Jawab	Waktu
1.	Penyusunan ren ops dan pengaktifasi Posko	Bupati, Setda Kabupaten Pulang Pisau	90 hari
2.	Rencana kebutuhan Operasional Posko (Sekretariat Posko)	BPBD, Dishutbun, Distanak, BLH, Bappeda, Badan Kesbang Linmaspol, Dinsosnakertrans, Dinkes, Dinas PU, UPTD PK, BMKG, PDAM, TNI, Polri, Satpol PP, Tagana, SAR, PMI, Pramuka, LSM, BPK Pemkab, PWI, PLN, BKP5K, ORARI/RAPI, TSA/TSAK/KMPK	Setiap hari
3	Pusdalops BPBD/Media Center	TRC dan Petugas Pusdalops BPBD/ BNPB	Setiap hari
4.	Deteksi dini	BMKG dan BLH	Setiap hari
5.	Mengkoordinasikan kegiatan sektoral	BPBD.	Setiap hari
6.	Mengkoordinasikan kebutuhan logistik sektoral	BPBD, Dinsosnakertrans, PU dan Koordinator lapangan masing-masing sektor	Setiap hari
7.	Menerima dan menyampaikan informasi (Publikasi)	Humas Pemkab, PWI, ORARI/RAPI, BPBD	Setiap hari
8.	Membuat laporan menyeluruh	Sekretariat Posko	Setiap hari
9.	Monitoring evaluasi	Sekretariat Posko	Setiap hari

d. Proyeksi Kebutuhan

Tabel 33. Proyeksi Kebutuhan Bidang Perencanaan

No	Uraian	Jumlah			Satuan	Sumber Dukungan
		Kebutuhan	Tersedia	Kekurangan		
OPERASIONAL SEKRETARIAT						
1.	Posko Induk	1	1	-	Buah	Pemkab
2.	Posko Lapangan	6	6	-	Buah	Kecamatan
3.	Komputer	2	2	-	Unit	Pemkab
4.	Genset	4	4	-	Unit	Pemkab
5.	Papan Informasi	2	2	-	Buah	Pemkab
6.	Radio Komunikasi,	20	20	-	Unit	Dishubkominfo, ORARI/RAPI/BPBD
7.	Antena Reviter/ RPU	5	2	-		Dishubkominfo, ORARI/RAPI/BPBD
8.	Telpon	1	1	-	Unit	Pemkab
9.	Internet	2	2	-	Unit	Pemkab/ BPBD
10.	Sepeda Motor	5	5	-	Unit	Satpol PP, Distanak/ BPBD
11.	Mobil Rescue	2	2	-	Unit	Dinsos, BPBD
12.	Meja	10	10	-	Buah	Pemkab
13.	Kursi	10	10	-	Buah	Pemkab
14.	Projektor	1	1	-	Unit	Pemkab/ BPBD
15.	Peta Wilayah	1	1	-	Buah	BPBD, Dishutbun, PU
16.	GPS	5	5	-	Unit	Dishutbun, BLH, PU
17.	Kamera	5	5	-	Unit	BPBD, PU
18.	ATK	1	1	-	Paket	Pemkab
LOGISTIK DAN PERALATAN POSKO LAPANGAN						
1.	Tenda Posko Lapangan	6	12	-	Buah	BPBD, Dinsos, BLH, Pramuka, TNI, Polri.

2.	Valbed	50	30	20	Buah	BPBD, Dinkes, Dinsos, TNI, Polri
3.		5	5	-	Unit	BPBD, Dinsos, Dishutbun, , DishubKominformo, TNI, Polri.
4.	Truck dapur umum	2		-	Unit	BPBD, Dinsos, Dinkes
5.	Makanan siap saji	50	50	-	Paket	BPBD, Dinsos, Dinkes, PMI
6.	Tambahan gizi	25	25	-	Paket	BPBD, Dinsosakertrans
7.	Lauk pauk	25	25	-	Paket	
8.	Kidwore	5	5	-	Paket	
9.	Peralatan dapur	1	1	-	Paket	
10.	Peralatan makan/ minum	1	1	-		
11.	Alat penerangan	5	5	-		
12.	Peralatan Trauma Healing	15	-	-	Paket	

2. Bidang Logistik dan Sarpras

a. Situasi dan Sasaran

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap tahun bersifat sporadis, terutama pada daerah gambut sehingga mengakibatkan akumulasi asap sangat tebal. Sulitnya aksesibilitas transportasi, kegiatan belajar mengajar karena ispu berada pada level index 200 (sangat tidak sehat) dengan jumlah penduduk yang terdampak 78.827 jiwa, jumlah penduduk yang terancam berjumlah 39.413 jiwa, jumlah penduduk yang sakit 9.851 jiwa, jumlah penduduk yang terluka 25 jiwa, jumlah penduduk yang memerlukan rumah oksigen berjumlah 150 jiwa, dan jumlah penduduk yang meninggal duni sebanyak 5 jiwa, oleh karena itu di dalam cluster Penangan Dampak dilakukan berbagai kegiatan dengan sasaran sebagai berikut:

- 1) Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi korban penderita ispa, diare, iritasi kulit dan mata, pada 8 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau.

- 2) Tersedianya save house atau rumah oksigen yang dapat digunakan menjadi tempat pengungsian warga ketika ispu mencapai level berbahaya (200).
- 3) Diberikannya pelayanan prioritas kepada kelompok rentan dan pemberian bantuan kebutuhan dasar, berupa sanitasi, nutrisi.

b. Kegiatan

Tabel 34. Tabel Jadwal Kegiatan Bidang Logistik dan Sarpras

No	Kegiatan	Pelaku/Penanggung Jawab	Waktu
1.	Menghentikan kegiatan belajar mengajar ketika ispu mencapai level berbahaya (200)	BLH, BPBD, Dinkes, Disdik	90 hari pada level ISPU 200
2.	Operasi pemadaman melalui darat Mengoptimalkan pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis bagi korban	BPBD, Damkar Pemkab, Dishutbun, Dinsos TNI, Polri, Satpol PP, Tagana, BPK Swasta,, Kecamatan, Kelurahan, TSA/TSK/KMPK/RPK /MPA Dinkes, RSUD, TNI, POLRI	Selama Tanggap Darurat (90 hari)
3.	Pendistribusian masker gratis untuk 12 puskesmas yang ada di wilayah Pulang Pisau	BPPT, BNPB. Dengan Permohonan Pemkab ke Pemerintah Pusat melalui (rekomendasi) Gubernur Kalteng Dinkes, BPBD, LSM dan Dunia Usaha, PMI	Selama Tanggap Darurat
4.	Menyediakan plang, rambu-rambu atau tanda bahaya di jalur transportasi dengan visibility rendah	BPBD, Damkar Pemkab, Dishutbun, Dinsos TNI, Polri, Satpol PP, Tagana, BPK Swasta, Institut, Kec, Kel. TSA/TSK/KMPK/RPK/MPA Dinas Perhubungan, PU, POLRI,	Selama Tanggap Darurat
5.	Penyusunan laporan Menyediakan lampu penerangan jalan dengan visibility rendah	BPBD, BLH, Dishutbun, Dinas Perhubungan, PLN, PU, POLRI	Selama Tanggap Darurat
	Menyediakan rumah oksigen atau shelter bagi korban	Dinkes, BPBD, Pemda Pulang Pisau	Selama Tanggap Darurat
	Menyiapkan paket bantuan berupa sandang pangan bagi korban yang lahan pertanian	Dinsos, BPBD, Dunia Usaha, LSM	Selama Tanggap Darurat

	dan perkebunannya yang terbakar		
	Menyediakan operasional mobil ambulance dan angkutan bagi korban	Dinkes, BPBD, Puskesmas, RSUD, TNI, POLRI	Selama Tanggap Darurat
	Menyediakan pelayanan rujukan bagi korban	Dinkes, RSUD, Puskemas,	Selama Tanggap Darurat

c. Proyeksi Kebutuhan

Tabel 35. Proyeksi Kebutuhan Bidang Logistik dan Sarpras

No	Uraian	Jumlah			Satuan	Sumber Dukungan	Keterangan
		Kebutuhan	Tersedia	Kekurangan			
1	Pos kes Rumah Oksigen	8	6 1	- 7	Unit	Dinkes, TNI, Polri. Dinkes, BPBD, Pemda Pulang Pisau	
2	Rumah sakit	4	1	3	Unit	RSUD, Polri, TNI, RS Swasta,.	
3	Puskesmas	6 11	11	-	Unit	Dinkes,	
4	Dokter umum	12	11	1	Orang	Dinkes, RSUD, Polri, TNI, RS Swasta, Puskesmas.	
5	Dokter spesialis	2	3	-	Orang		
6	Perawat/ bidan	80	285	-	Orang		
7	Surveillance	11	12	-	Unit		
8	Obat-obatan					Dinkes, RSUD PMI, puskesmas.	
	- ISPA						
	Parasetamol	71.604	100.000	0	Tab		
	OBH	11.934	15.000	0	Tab		
	Vitamin	59.670	25.000	24.670	Tab		
Amoxyxilin	75.000	50.000	25.000	Tab			
	- Luka bakar		5.000	0	Botol		
	Bio Placenton	16	2.000	0	Botol		
	Larutan NaCl	5					
9	APD Petugas					Puskesmas	
	- Masker	270	300	0	Lembar		
	- Sarung Tangan	270	300	0	Pasang		
10	Mobil ambulance	6	16	-	Unit	Dinkes, RSUD PMI	
11	Masker	4.800.000	28.000	4.772.000	Buah	Dinkes, PMI, BPBD	
		1.000.000	6.000	994.000			
12	Tabung oksigen	5	5	-	Buah	Dinkes, PMI,	
		8		3			

	Paket bantuan sandang dan pangan	30.000 kg	100 ton		ton	Paket bantuan beras	CBP (alokasi Kab. Pulang Pisau)
--	----------------------------------	-----------	---------	--	-----	---------------------	---------------------------------

3. Bidang Operasi

a. Strategi

- Melaksanakan SOP dan mengefektifkan peran pos Lapangan di masing-masing wilayah Kecamatan yang terdampak dalam pengendalian kebakaran hutan lahan.
- Menugaskan dan pengerahan personel dari Unsur TNI/ POLRI, Manggala Agni sebagai koordinator pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
- Melaksanakan surveilans pada wilayah bencana kebakaran hutan dan lahan untuk mengetahui dampak dan kebutuhan dasar.
- Memonitor dan koordinasi dalam pengerahan personel ke pos lapangan, untuk melaksanakan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan sesuai kebutuhan.
- Menentukan skala prioritas dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, terutama yang menyangkut objek-objek vital dan menjadi indikator tingkat bencana kebakaran hutan dan lahan seperti: fasilitas umum dan pemukiman.

b. Situasi

- Fire Spot tersebar di wilayah 8 Kecamatan dan sporadis, oleh lahan kering dan angin kencang,
- Kendala Kepekatan asap tebal, sehingga sulit dipantau kobaran api saat pemadaman darat, sehingga meminta bantuan ke Pos Komando tingkat Propinsi
- Akses jalan sulit, dan sumber air untuk pemadam kering.

c. Sasaran

- Menyelamatkan area pertanian, perkebunan, fasilitas umum, dan pemukiman dan sarana umum (perkantoran Pemkab Pulang Pisau
- Menyelamatkan asset-aset pemerintah

- Melakukan himbauan dan Intruksi kepada masing-masing OPD untuk membantu dan pengerahan sumber daya dalam pemadaman hutan dan lahan yang dekat dengan area perkantoran.

d. Kegiatan

- Melakukan himbauan dan Intruksi kepada masing-masing OPD untuk membantu dan pengerahan sumber daya dalam pemadaman hutan dan lahan yang dekat dengan area perkantoran.
- Menentukan lokasidan menetapkan poslapangan, pos pembantu pada daerah yg terdampak
- Kaji cepat terhadap wilayah bencana sebagai dasar menentukan kebutuhan logistik dan tenaga yg akan digunakan
- Pengerahan seluruh sumberdaya yg tersedia ke wilayah bencana
- Pemantauan terhadap seluruh jalannya operasi lapangan
- Koordinasi dan pemanduan seluruh personil, informasi dan data yang tersedia
- Menghimpun dan mengolah seluruh data hasil pemadaman dan penanganan dampak bencana yang terjadi
- Melaksanakan dan monitor melalui upaya pencegahan patroli kebakaran hutan dan lahan dengan pos lapangan
- Melaksanakan pengerahn personil bek up ke pos lapangan dalam pemadaman kebakran hutan dan lahan

e. Proyeksi Kebutuhan

Tabel 36. Proyeksi Kebutuhan Bidang Operasi

No	Jenis Sumberdaya	Standar		Volume			Strategi Pemenuhan
				Kebutu- han	Keterse- diaan	Kesenjan- gan	
1	Mobil Patroli/ Mobil Komando/ Pik Up	1	Unit/ Tim	4	4	-	Manggala Agni, Dinas Pertanian, BPBD
2	GPS	1	Unit/ tim	2	2	-	Manggala Agni, Dinas Pertanian, BPBD
3	Handy Tranceiver	2	Unit/ tim	4	4	-	BPBD, RAPI
4	Pesawat Drone	2	buah	2	2		BPBD/TNI/Polres
5	Mesin pemadam dan perlengkapannya (selang, nozzle, handtools, personel use, dll)	2	Set/ tim	5	15	-	Manggala Agni, BPBD, dinas Pertanian, TN Sebangau/ TNI/POLRI

4. Skenario

a. Strategi

- i. Menentukan lokasi dan menetapkan poslapangan, pos pembantu pada daerah yg terdampak
- ii. Kaji cepat terhadap wilayah bencana sebagai dasar menentukan kebutuhan logistik dan tenaga yg akan digunakan
- iii. Pengerahan seluruh sumberdaya yg tersedia ke wilayah bencana
- iv. Pemantauan terhadap seluruh jalannya operasi lapangan
- v. Koordinasi dan pemanduan seluruh personil, informasi dan data yang tersedia
- vi. Menghimpun dan mengolah seluruh data hasil pemadaman dan penanganan dampak bencana yang terjadi

b. Sasaran

- i. Terkendalinya seluruh tahapan operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada wilayah terdampak
- ii. Terlindunginya masyarakat dan lingkungan dari dampak bencana
- iii. Menghadirkan Nawacita Presiden Republik

c. Kegiatan

Tabel 37. Skenario Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Pelaku		Jangka Waktu Pelaksanaan		Durasi
		Instansi/Lembaga	Instansi Penanggung Jawab Kegiatan	Waktu Dimulai	Waktu Berakhir	
1	Aktifasi Posko	Setda Kabupaten Pulang Pisau	Setda Kabupaten Pulang Pisau	Agustus	September	60 Hari
2	Operasional Posko	BPBD, Distanak, Dinas KesbangPol, Dinsos, Nakertrans, DinKes, Dinas PU, UPTD PK, BMKG, PDAM, TNI, Polres, Satpol PP, Tagana, SAR, PMI, Pramuka, LSM, BPK Pemkab, PWI, PLN, Dinas Ketahanan Pangan, ORARI/RAPI, Destana, MPA	BPBD	Agustus	September	60 Hari
3	Deteksi Dini	Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau, Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), SPTN II Sebangau, Manggala Agni DAOPS, Polres Pulang, UPTD PSKI dan Lahan Gambut, NGO/CSO yang bergerak di bidang pengolahan data dan informasi,	Seksi PUSDATIN BPBD	Agustus	September	60 Hari

		TRC BPBD Kabupaten Pulang Pisau (Seksi PUSDATIN)				
4	Mengkoordinasikan Kegiatan Sektorial	BPBD	Insident Comander	Agustus	September	60 Hari
5	Mengkoordinasikan Kebutuhan Logistik Sektorial	BPBD, Dinsos, Nakertrans, Dinas PU, Koordinator Lapangan	Insident Comander	Agustus	September	60 Hari
6	Menerima dan Menyampaikan Informasi	Humas Pemkab, PWI, ORARI/RAPI, BPBD, Dinas Kominfo	Insident Comander	Agustus	September	60 Hari
7	Membuat Laporan Menyeluruh	Sekretariat Pos Komando	Insident Comander	Agustus	September	60 Hari
8	Monitoring-Evaluasi	Sekretarian Pos Komando	Insident Comander	Agustus	September	60 Hari

d. Proyeksi Kebutuhan

Tabel 38. Pelaksanaan Skenario

No	Jenis Sumberdaya	Volume			Strategi Pemenuhan
		Kebutuhan	Ketersediaan	Kesenjangan	
	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
1	Posko Induk	1	1	-	Pemkab
2	Posko Lapangan	8	8	-	Kecamatan
3	Komputer	2	2	-	Pemkab
4	Genset	4	4	-	Pemkab
5	Papan Informasi	2	2	-	Pemkab
6	Radio Komunikasi,	20	20	-	Dishub,Dinas Kominfo, ORARI/RAPI/BPBD
7	Antena Reviter/RPU	5	2	-	Dishubkominfo, RARI/RAPI/BPBD
8	Telpon	1	1	-	Pemkab
9	Internet	2	2	-	Pemkab/ BPBD

10	Sepeda Motor	5	5	-	Satpol PP, Distanak/ BPBD
11	Mobil Rescue	2	2	-	Dinsos, BPBD
12	Meja	10	10	-	Pemkab
13	Kursi	10	10	-	Pemkab
14	Projektor	1	1	-	Pemkab/ BPBD
15	Peta Wilayah	1	1	-	BPBD, Dinas PU
16	GPS	5	5	-	DLH, Dinas PU
17	Kamera	5	5	-	BPBD, Dinas PU
18	ATK	1	1	-	Pemkab
LOGISTIK DAN PERALATAN POSKO LAPANGAN					
1	Tenda Posko Lapangan	8	16	-	BPBD, Dinsos, DLH, Pramuka, TNI, Polres
2	Valbed	50	30	20	BPBD, DinKes, Dinsos, TNI, Polres
3		5	5	-	BPBD, Dinsos, Dishub, Dinas Kominfo, TNI, Polri
4	Truck dapur umum	2	-	-	Dinsos
5	Makanan siap saji	50	50	-	BPBD, Dinsos, Dinkes, PMI
6	Tambahan gizi	25	25	-	BPBD, Dinsos, Nakertras, Dinkes
7	Lauk pauk	25	25	-	BPBD, Dinsos, Nakertras, Dinkes
8	Kidwore	5	5	-	BPBD, Dinsos, Nakertras, Dinkes
9	Peralatan dapur	1	1	-	BPBD, Dinsos, Nakertras, Dinkes
10	Peralatan makan/ minum	1	1	-	BPBD, Dinsos, Nakertras, Dinkes
11	Alat penerangan	5	5	-	BPBD
	TOTAL	262	245	20	

5. Bidang Admin dan Keuangan

a. Strategi:

- Mengidentifikasi kebutuhan peralatan dan logistik untuk masing-masing bidang

- Mengidentifikasi ketersediaan sarana dan peralatan dari setiap instansi OPD dan lembaga
- Menyediakan kebutuhan peralatan dan logistik
- Melaksanakan SOP pendistribusian logistik dan peralatan

b. Situasi:

Dalam kondisi saat terjadi bencana karhutla, Bidang logistik dan peralatan diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan masing-masing bidang yaitu:

- Bidang Operasi Pemadaman
- Kebutuhan logistik, BBM, Konsumsi personil
- Kebutuhan peralatan , Pompa air, Kendaraan pengangkut air, Kendaraan personil
- Bidang Penanganan Dampak, Kebutuhan Logistik
- Obat-obatan, konsumsi personil dan konsumsi korban bencana
- Kebutuhan peralatan, Alat berat

c. Sasaran:

Terwujudnya kesiapan kebutuhan logistik dan peralatan yang dibutuhkan oleh personil serta korban yang terdampak bencana

d. Kegiatan

Tabel 39. Kegiatan Bidang Admin dan Keuangan

No	Kegiatan	Pelaku/Penanggung Jawab	Waktu	Keterangan
1.	Menyusun Strategi Distribusi Logistik	BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan	90 hari	
2.	Penyediaan BBM	BPBD, Dinas Sosial, Dinas PU, Polres Pulang Pisau, TNI, Satpol PP, Manggala Agni, Balakar, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, PDAM	90 hari	
3.	Pendirian dapur umum	Dinas Sosial	90 hari	
4.	Pendistribusian konsumsi personil	BPBD, Dinas Sosial, Dinas PU, Polres Pulang Pisau, TNI, Satpol PP, Manggala Agni, Balakar, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, PDAM	90 hari	

e. Proyeksi Kebutuhan

Tabel 40. Proyeksi Kebutuhan Bidang Admin dan Keuangan

No	Jenis Sumberdaya	Volume			Strategi Pemenuhan	KET
		Kebutuhan	Ketersediaan	Kesenjangan		
1.	Mobil Pemadam	16	26			Unit
2.	Mesin pompa Shibora	8	2	6,00	Pinjam ke kab. Terdekat	Unit
3.	Mesin pompa portable	24	6	18,00		Unit
4.	Mobil personil	20	7	13,00	Pengerahan semua kendaraan OPD	Unit
5.	Bahan Bakar Minyak (solar)	28.800	28.800			Liter
6.	Bahan Bakar Minyak (bensin)	185.400	185.400			Liter
7.	Konsumsi Personil	25.200	16.650			Paket
8.	Konsumsi Korban (Logistik)	400 gram x 1 hari x 1 jiwa x waktu penetapan status	-	-	Cadangan Beras Pemerintah	Kilogram

6. Bidang Penegakan Hukum

a. Strategi:

- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan;
- Sosialisasi Perda dan Maklumat Kapolda Kalimantan Tengah;
- Pelatihan BINKUAT (Pembinaan Kekuatan) melalui peningkatan kemampuan dan ketrampilan penanggulangan Karhutla;
- Pemasangan Maklumat.

b. Situasi:

Dalam kondisi saat terjadi bencana karhutla pada Bidang Penegakan Hukum, antara lain:

- Posko Comand Center;
- Penyiapan Personil Penyidik Pembantu;

- Melatih Kemampuan para Penyidik;
- Penerapan Perundang-undangan terkait Bencana Karhutla;

c. Sasaran:

- Patroli Pencegahan dilaksanakan pada masing Polsek di setiap kecamatan oleh para Babinkantibmas;
- Melaksanakan pemadaman Karhutla secara terpadu;
- Identifikasi dan Penegakan Hukum terhadap pelaku Karhutla dengan melibatkan Gakum-Terpadu.

d. Proyeksi Kebutuhan

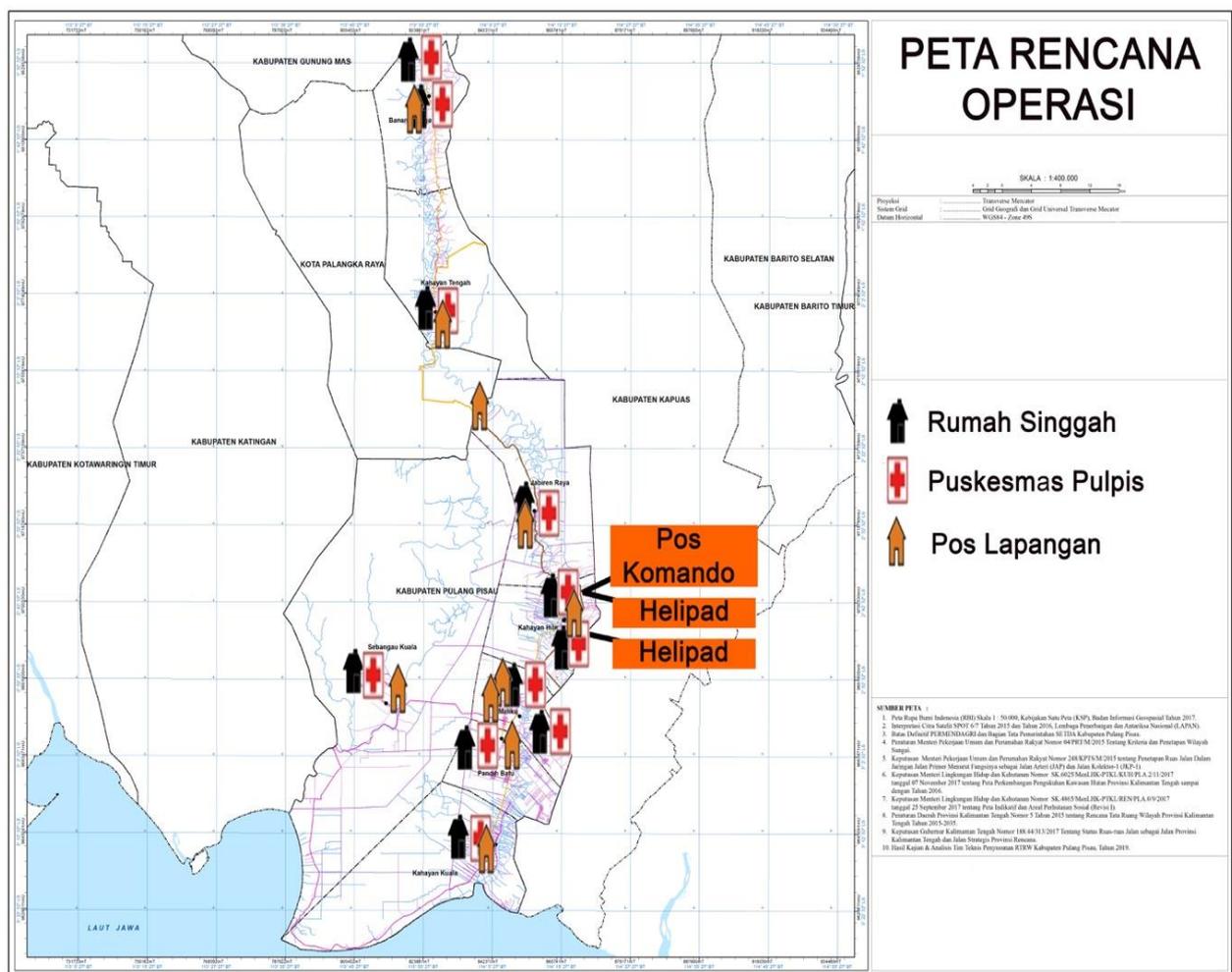
Tabel 41. Proyeksi Kebutuhan Bidang Penegakan Hukum

No	Jenis Sumberdaya	Volume			Strategi Pemenuhan	KET
		Kebutuhan	Ketersediaan	Kesenjangan		
1	Mobil Dikmas (Pendidikan Masyarakat)	9	1	8	Peminjaman; Pembelian melalui anggaran dari Pemda dan pihak ketiga yang tidak mengikat	Unit
2	Mobil Patroli	5	2	3	Peminjaman; Pembelian melalui anggaran dari Pemda dan pihak ketiga yang tidak mengikat	Unit
3	Mobil Tangki Aor	4	-	4	Peminjaman; Pembelian melalui anggaran dari Pemda dan pihak ketiga yang tidak mengikat	Unit
4	APD	30	3	27	Peminjaman; Pembelian melalui anggaran dari Pemda dan pihak ketiga yang tidak mengikat	Unit
5	Motor	12	2	10	Peminjaman; Pembelian melalui anggaran dari Pemda dan pihak ketiga yang tidak mengikat	Unit
6	Personil	40	40	-	Lengkap	Unit

7	Mesin dan Perangkat Pemadam	30	15	15	Peminjaman; Pembelian melalui anggaran dari Pemda dan pihak ketiga yang tidak mengikat	Unit
---	-----------------------------	----	----	----	---	------

C. Peta Rencana Operasi.

Gambar 18. Peta Rencana Operasi



BAB VII

PEMANTAUAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

1. Rencana Kontinjensi bencana kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Pulang Pisau ini disusun berdasarkan kesepakatan seluruh unsur baik pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat yang terkait dengan penanggulangan bencana di wilayah Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dan di aktifkan saat terjadi status Darurat bencana Karhutla sebagai rencana Operasi;
2. Rencana Kontinjensi ini disetujui dan ditandatangani serta menjadi komitmen bersama oleh setiap unsur yang terlibat dalam penyusunan.
3. Rencana Kontinjensi ini diaktifasi menjadi rencana operasional pada saat terjadi bencana setelah dilakukan penilaian Review yang ke 2 (dua) secara cepat dan penyesuaian komponen serta kebutuhan sesuai kondisi dan intensitas bencana.
4. Koordinasi secara berkala untuk memperbaharui dokumen rencana kontinjensi ini perlu dilakukan setiap 2 tahun sebelum masuk musim kemarau untuk disesuaikan dengan perkembangan, termasuk *updating* data ketersediaan sumberdaya pada masing-masing instansi/lembaga. Jadwal koordinasi dapat dilakukan dengan tata waktu:

Tabel 42. Jadwal Koordinasi Berkala

No	Kegiatan	Bulan							
		Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop
1.	Rapat Kesiapsiagaan	■							
2.	Penyusunan Pedoman Praktis		■						
3.	Kaji ulang renkon	■	■	■					
4.	Asistensi/koordinasi daerah			■	■	■	■	■	
5.	Operasional posko					■	■	■	
6.	Penanggulangan					■	■	■	
7.	Monitoring evaluasi					■	■	■	
8.	Penyusunan laporan					■	■	■	■

5. Kajian Risiko bencana perlu dilakukan sebagai acuan bagi perencanaan dan penataan kawasan dalam jangka panjang.
6. Inventarisasi persediaan (*buffer stock*) untuk pemenuhan kebutuhan darurat perlu diselenggarakan dengan manajemen logistik yang baik.
7. Perlu dibangun jejaring yang lebih luas (termasuk dengan lembaga usaha) agar seluruh sumberdaya di wilayah Kabupaten Pulang Pisau dapat dioptimalkan dalam penanggulangan bencana, baik dalam tahap pra-bencana, saat tanggap darurat, maupun pasca bencana.
8. Perlu upaya semua pihak untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana yang mungkin terjadi, antara lain melalui:
 - a. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan melalui penyuluhan, sosialisasi, pelatihan, kampanye, dll.
 - b. Peningkatan teknik dan keterampilan regu pemadam kebakaran masyarakat, terutama pada daerah rawan kebakaran.
 - c. Melengkapi peralatan pemadam kebakaran bagi masyarakat yang berada pada daerah rawan kebakaran.
 - d. Revitalisasi dan penguatan pengawasan peraturan terkait pembukaan lahan dengan sistem bakar.

BAB VIII

PENUTUP

Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan adalah tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah, Dunia Usaha serta masyarakat. Keberhasilan dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan sangat tergantung dari peran serta dan komitmen para pihak terkait (*stakeholders*).

Rencana kontijensi ini dibuat sebagai acuan dan referensi bagi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dan segenap unsur yang terlibat dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Dengan terkendalinya kebakaran hutan dan lahan di Wilayah Kabupaten Pulang Pisau sebagai upaya penecagahan dan kesiapsiagaan sehingga permasalahan asap yang selalu terjadi pada musim kemarau di wilayah ini akan dapat teratasi.

Rencana kontinjensi ini masih perlu penyempurnaan dan *review* secara berkala untuk pemutakhiran data dan informasi.

Pulang Pisau, 30 September 2021

BUPATI PULANG PISAU,

PUDJIRUSTATY NARANG

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU

 www.pulangpisaukab.go.id/

 @pulangpisaukab

 admin pulangpisaukab

 78M3+8VQ, Desa Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir,
Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, 73564